

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) untuk periode waktu 5 (lima) tahun. Renstra tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditingkat perangkat daerah. Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah diperlukan sebagai upaya yang terukur dalam rangka penanggulangan bencana dan utamanya upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, yang secara administrative terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota, 573 kecamatan dan 8.559 desa/

kelurahan (7.809 desa dan 750 kelurahan). Secara kebencanaan wilayah tersebut mempunyai risiko terhadap bencana, yaitu:

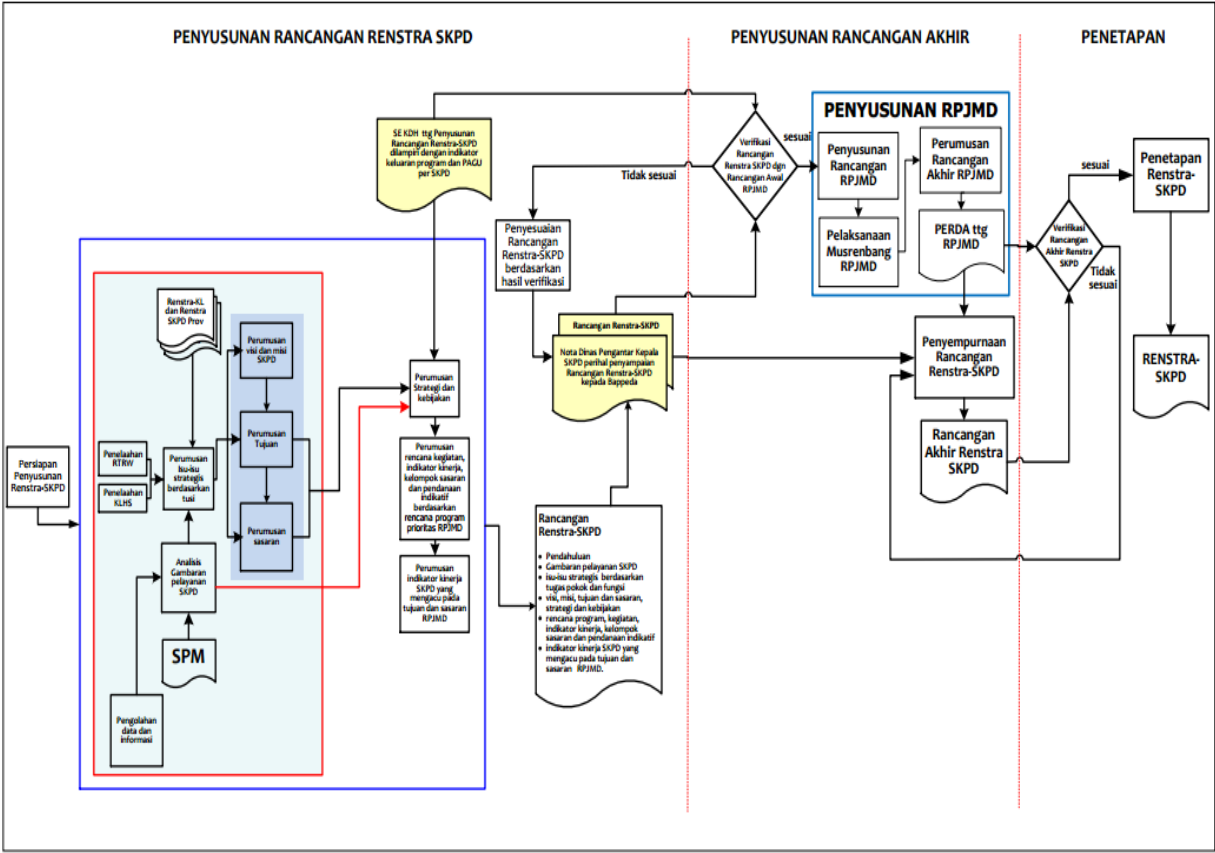
- Wilayah dataran meliputi dataran pantai dan dataran alluvial. Dataran alluvial dan pantai mendominasi di daerah sisi utara Jawa Tengah,
- Daerah pegunungan meliputi Pegunungan Muria, Kendeng. Gunung berapi di Jawa Tengah meliputi Gunung Merapi, Slamet, Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan Dataran Tinggi Dieng.
- Secara hidrologi, Jawa Tengah dilalui oleh beberapa sistem sungai besar yang membentuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Jawa Tengah mempunyai 128 (seratus dua puluh delapan) DAS yang dikelompokkan dalam 10 Wilayah Sungai (WS).
- Selain faktor ancaman dari kondisi alam, kebencanaan ditentukan pula oleh faktor kerentanan masyarakat terhadap bencana. Data kependudukan Jawa Tengah menunjukkan kerentanan yang relatif tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana. Data BPS tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah ± 36.020.405 jiwa.

Secara kajian akademis, wilayah di Jawa Tengah mempunyai potensi bencana, dengan demikian sebagian besar penduduk di Jawa Tengah menempati dan tinggal di daerah rawan bencana. Potensi bencana yang terjadi di Jawa Tengah meliputi seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempabumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, gunungapi, abrasi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, Epidemi dan Wabah Penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah sekaligus wujud dan peran serta BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2018-2023. Dokumen Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur tahun 2018-2023. Renstra periode 2018-2023 menyajikan agenda

utama kegiatan BPBD Prov Jawa Tengah dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Proses penyusunan Renstra SKPD melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan Penetapan Renstra SKPD, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 1 Proses Penyusunan Renstra SKPD
(Sumber Lampiran IV Permendagri 54/2010)

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
12. Peraturan Daerah No. 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029;
14. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Prov. Jawa Tengah

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 tahun 2014 tentang Perubahan Pergub No. 78 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah
21. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Pedoman bagi BPBD Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2018-2023.
- b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPBD Prov. Jawa Tengah
- c. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, analisis, dan evaluasi di lingkungan BPBD Prov Jawa Tengah serta instansi terkait, kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

2. Tujuan

- a. Sebagai landasan operasional BPBD Prov. Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Dasar evaluasi kinerja capaian kinerja program dan kinerja BPBD Prov Jawa Tengah.
- c. Alat/pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan PB.

D. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan

masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok

Dengan terbitnya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, beberapa tugas pokok di masing-masing OPD telah disesuaikan. Tugas pokok BPBD Prov Jawa Tengah jika Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah, penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

2. Fungsi

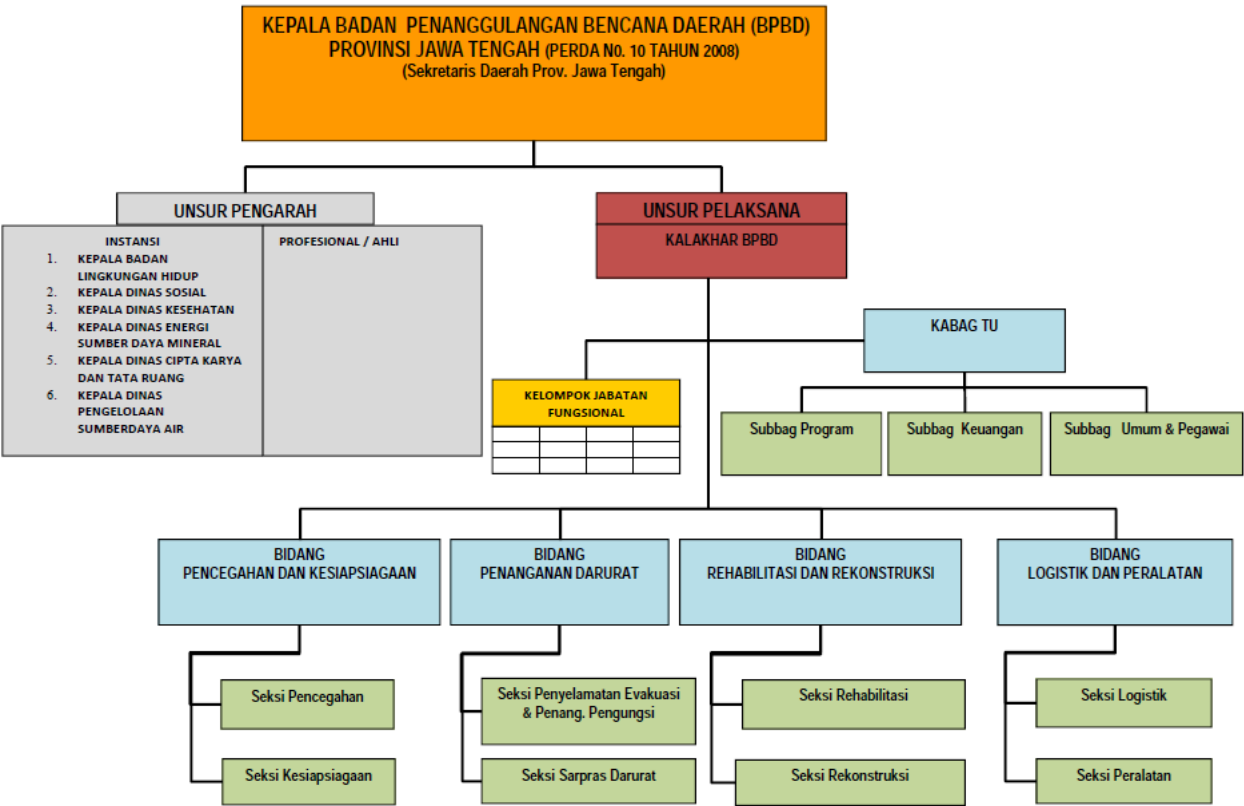
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi BPBD Jawa Tengah

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang

Logistik dan Peralatan, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah. Struktur organisasi BPBD Prov Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah

a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Prov Jawa Tengah

Kalakhar BPBD Prov Jawa Tengah, membawahkan: Bagian Tata Usaha, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Logistik dan Peralatan, Satuan Tugas; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bagian Tata Usaha

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program;

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan bidang keuangan;
- c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bagian tata usaha terdiri dari 3 subbagian, yaitu :

a) Sub Bagian Program;

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Sekretariat BPBD.

b) Sub Bagian Keuangan;

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat BPBD.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat BPBD.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

2) Fungsi

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan bencana;

b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana;

c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a) Seksi Pencegahan;

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengurangan risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran;

b) Seksi Kesiapsiagaan;

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan bidang penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan, gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

d. Bidang Penanganan Darurat

1) Tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat.

2) Fungsi

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana prasarana darurat;

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3). Seksi pada Bidang Penanganan Darurat

a) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan sarana dan prasarana vital.

b) Seksi Sarana dan Prasarana Darurat.

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana darurat, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses di bidang penerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perijinan, pengadaan barang dan jasa darurat, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

1) Tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

2) Fungsi

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi;

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a) Seksi Rehabilitasi;

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang

perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

b) Seksi Rekonstruksi

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

f. Bidang Logistik dan Peralatan, terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik dan peralatan.

2) Fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan.
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kalakhar BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi pada Bidang Logistik dan Peralatan

a) Seksi Logistik

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang logistik, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan

air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan kesehatan, psikososial, pengerahan logistik, pengadaan barang dan jasa, penyediaan dan pendirian dapur umum.

b)Seksi Peralatan

Tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang peralatan, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan, pengerahan, pemeliharaan, perawatan, dan penerima peralatan penanggulangan bencana.

B. Sumber Daya BPBD Jawa Tengah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur pegawai; yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil PNS. Jumlah pegawai dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1
Pegawai BPBD Prov Jawa Tengah

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir						
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PNS	44	8	20	15	1	11	4	1	52
2	Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outsourcing	20	4	1	16	1	6	-	-	24
Total		64	12	21	31	2	17	4	1	76

Sumber: Data Pegawai BPBD Prov Jateng s.d Desember 2018

Sementara untuk dukungan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

NO	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	2	3
1	Golongan IV	: 13 orang
	a Pembina Utama Madya (IV/d)	: 1 orang
	b Pembina Utama Muda (IV/c)	: - orang
	c Pembina Tk I (IV/b)	: 4 orang
	c Pembina (IV/a)	: 8 orang
2	Golongan III	26 orang
	a Penata Tk I (III/d)	: 10 orang

NO PANGKAT / GOL		JUMLAH	
1	2	3	
b	Penata (III/c)	:	8 orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	:	6 orang
d	Penata Muda (III/a)	:	2 orang
3	Golongan II		11 orang
a	Pengatur Tk I (II/d)	:	- orang
b	Pengatur (II/c)	:	4 orang
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	:	4 orang
d	Pengatur Muda (II/a)	:	3 orang
4	Golongan I		2 orang
a	Juru Tk I (I/d)	:	1 orang
b	Juru (I/c)	:	1 orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	:	- orang
d	Juru Muda (I/a)	:	- orang
JUMLAH		:	52 orang

2. Sarana dan Prasarana PB

Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik local, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Provinsi Jawa Tengah menggunakan sarana dan prasaran ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dalam menangani bencana.

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2018

No	Nama Bidang	31 Des 2017		31 Des 2018	
		Jmlh	Harga (Rp)	Jmlh	Harga (Rp)
1	2	3	4		
1	Tanah	2	3.100.000.000	2	3.100.000.000
	Tanah	2	3.100.000.000	2	3.100.000.000
2	Peralatan Dan Mesin				
	Alat-alat besar	35	2.972.653.000	35	2.972.653.000
	Alat-alat Angkutan	114	12.503.679.043	114	12.503.679.043
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	6	309.100.000	6	309.100.000
	Alat-alat Pertanian / Peternakan				
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.104	5.883.017.901	2.104	5.883.017.901
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	576	1.625.556.949	576	1.625.556.949
	Alat-alat Kedokteran				
	Alat-alat Laboratorium				
	Alat-alat Keamanan	294	1.563.276.003	294	1.563.276.003
	Alat Metrologi dan				

No	Nama Bidang	31 Des 2017		31 Des 2018	
		Jmlh	Harga (Rp)	Jmlh	Harga (Rp)
1	2	3	4		
	Geofisika/Alat Ukur				
	Alat Olah Raga				
3	Gedung Dan Bangunan	3	6.877.783.968	3	6.877.783.968
	Bangunan Gedung	3	6.877.783.968	3	6.877.783.968
4	JALAN, DAN IRIGASI				
	Jalan dan Jembatan				
	Bangunan Air / Irigasi	7	89.000.000	7	89.000.000
	Instalasi	1	91.433.000	1	91.433.000
	Jaringan				
5	ASET TETAP LAINNYA				
	Buku Perpustakaan	484	53.422.955	484	53.422.955
	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	7	875.000	7	875.000
	Hewan Ternak dan Tumbuhan				
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	JUMLAH	3.640	35.187.864.885	3.640	35.187.864.885

Sumber: Jurnal Mutasi Barang Desember 2018

Sedangkan sarana dan prasarana untuk kondisi tertentu seperti kendaraan dengan fungsi khusus, seperti kendaraan transportasi, komunikasi, peralatan/perlengkapan evakuasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2018

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
I	01	Alat Transportasi		
		1	Mobil Ambulance	3
		2	Mobil Tangki BBM	
		3	Mobil Evakuasi	
		4	Mobil Pemadam Kebakaran	
		5	Helikopter	
		6	Mobil Komando	1
		7	Mobil Patroli	
		8	Mobil Jelajah	
		9	Mobil Operasional	9
		10	Mobil Komunikasi	1
		11	Mobil Rescue	8
		12	Motor Ops	14
		13	Motor Trail	12
		14	Mobil Jenazah	1
		15	Mobil Box	2
		16	Pick Up	1
		17	Mobil Logpal	1

No 1	Kode 2	Jenis Peralatan 3		Jumlah (unit) 4
		18	Truk Serbaguna	1
		19	Mobil Dapur Lapangan	1
		20	Truk Logistik	1
		21	Truk Tangki Air	5
		22	Truk Urinoir MCK	2
		23	Mobil Water Treatmen	1
		24	Truk bak terbuka	2
		25	Kapal Motor	
		26	Mini Bus	1
		27	Mobil Klik	
			Jumlah	67
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi		
		1	Sistem Komunikasi Cepat	
		2	Portable Communication Mobile	
		3	HT	21
		4	RIG	6
		5	GPS	3
		6	Telepon Internet Satelit	
		7	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini	
		8	SSB/RPP	3
		9	UHF	3
		10	Wireless	
		11	Megaphone	3
		12	Repiter / Antena	4
		13	Video Shooting	
		14	Camera Digital	4
		15	Handycam	2
		16	Power Supply	2
			Jumlah	51
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi		
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	5
		2	Rompi	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	48
		4	Lifebouy	8
		5	Perahu Karet 12 org	
		6	Perahu Karet 10 org	14
		7	Perahu Karet 8 org	2
		8	Perahu Karet 6 org	1
		9	Masker Full Face	6
		10	Perahu Lipat + Mesin 18 PK	1
		11	Trailer	2
		12	Perahu Polyethilene + Mesin 9,8 PK	
		13	Mesin Perahu 40 PK	5
		14	Mesin Perahu 25 PK	5
		15	Mesin Perahu 18 PK	5
		16	Mesin Perahu 15 PK	1
		17	Dolphin / speed boat	2

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		18	Peralatan Selam	7
		19	Vertical Rescue	6
		20	Teropong / Teleskop	4
		21	Chain Saw	6
		22	Helm SAR	4
		23	Pulay	10
		24	Breathing Appars	2
		25	Life Detector	
		26	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	
		27	Pakaian Tahan Panas	2
		28	Pompa Perahu	14
		29	Rak Tempat Perahu Karet	5
		30	Selang BBM	14
		31	Sandaran Mesin Tempel	4
		32	Perahu Alumunium	
		33	Jangkar	
		34	Ring Buoy	
		35	Tali PP 10 mm	
		36	Tangki BBM	14
		37	Dayung	20
		38	Pakaian Tahan Api	
		39	Helm Tahan Panas	
		40	Sepatu	
		41	Sarung Tangan	
		42	Helm Biasa	
		43	Perahu Kayu	2
		44	Bidai Spinal	2
		45	Perahu Amphibi	1
			Jumlah	222
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
		1	WTP 250 lt	2
		2	WTP 500 lt	0
		3	WTP mini	2
		4	Dapur Lapangan/Umum	
		5	Fleksible Tank 2000 lt	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	2
		7	Toilet Lapangan	
		8	Tenda Posko	13
		9	Tenda Keluarga	100
		10	Tenda Regu	30
		11	Tenda Pleton	24
		12	Tenda Pengungsi	5
		13	Tenda Sekolah	
		14	Tenda Lapangan	
		15	Tenda RS Lapangan	
		16	Tenda Individu	2
		17	Tenda Doom	

No 1	Kode 2	Jenis Peralatan 3		Jumlah (unit) 4
		18	Tandu Lipat	6
		19	Echosounder	2
		20	Velbed	125
		21	Tandon Air Plastik	
		22	Tandon Air Fiber Glas	1
		23	Tandu Spinal	
		24	Tenda Terpal Plastik	
		25	Jas Hujan	
		26	MCK Komunal	
			Jumlah	316
V	05	Alat Berat		
		1	Scope Loader	-
		2	Back Hoe	-
		3	Truck W Crane 3 Ton	-
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	-
		5	Crane on Wheel 15 Ton	-
		6	Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3	-
		7	Head Tractor & trailer	-
		8	Loader	-
		9	Exavator	-
		10	Dump Truck	-
		11	Grader	-
		12	Bulldoser	-
		13	Ponton	-
		14	Vibro Hammer	-
		15	Wheel Loader	-
		16	Ulhanor Roller	-
			Jumlah	-
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan		
		1	Senter	9
		2	Solar Sel Generator	
		3	Lampu Senter HID	2
		4	Lampu Srt Halogen	3
		5	Lampu Badai	
		6	Genset 5 KVA	2
		7	Genset 10 KVA	1
		8	Genset 1,2 KW	4
		9	Genset 1000 watt	6
		10	Solar Handle Lamp	60
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	7
		12	Light Tower Port	2
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	4
		14	Kabel	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	4
		17	Senter Besar	
		18	Lampu Rotator	
		19	Lampu Sorot	

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		20	Emergency Lamp	6
			Jumlah	
VII	7	Alat Pergudangan		
		1	Froklift	2
		2	Hand Froklift	1
		3	Gerobak Sorong	-
		4	Trolley	2
		5	Rak Gondola	
		6	Palka	100
		7	Safety Equipment	
		8	Tenda Gudang	
		9	Water Closed	
		10	Tabung Gas 12 Kg	
		11	Tabung Gas 3 Kg	
		12	Selang	
		13	Helm Kerja / PMK	
		14	Topi Proyek	
			Jumlah	105
VIII	8	Alat Lainnya		
		1	Pompa air	6
		2	Kawat Bronjong	
		3	Karung Plastik	-
		4	Garpu Sampah	-
		5	Dirgen 40 L	-
		6	Hand Sprayer	-
		7	Knock Down Closet	-
		8	Mesin Fogging	-
		9	Drag Bar	-
		10	Water furifier	-
		11	CCTV	-
			Jumlah	6
			Jumlah Total	880

Sumber : Data Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Tengah s.d Desember 2018 pada Bidang Logistik dan Peralatan BPBD Prov Jateng

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:

- 1. Kawasan Rawan Banjir;
- 2. Kawasan Rawan Kekeringan;
- 3. Kawasan Rawan Tanah Longsor;
- 4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
- 5. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
- 6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang;
- 7. Kawasan Rawan Tsunami;
- 8. Kawasan Rawan Abrasi;
- 9. Kawasan Rawan Angin Topan;
- 10. Kawasan Rawan Gas Beracun.

Kajian kebencanaan di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang kajian risiko dan kajian rawan bencana. Kajian rawan bencana BNPB tahun 2011 Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah rawan tinggi bencana sedangkan kajian risiko bencana BNPB 2013 termasuk risiko tinggi. Mendasarkan hasil dua kajian tersebut, posisi Provinsi Jawa Tengah meskipun termasuk rawan tinggi (peringkat 1 dari 33 provinsi di Indonesia) namun secara risiko pada peringkat 13. Artinya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama 2011 – 2013 telah memberikan dampak sehingga meskipun tingkat kerawanan tinggi namun risiko bencana dapat dikurangi. Tingginya ancaman dan risiko bencana di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana. Ditingkat kabupaten/kota, mendasarkan hasil kajian BNPB tahun 2013, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 22 Kabupaten/Kota risiko tinggi, dan 13 Kabupaten /Kota lainnya termasuk risiko sedang. Hasil tersebut didasarkan pada perhitungan indeks risiko bencana sebagaimana diatur dalam Perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang kajian risiko bencana. Perhitungan indeks risiko bencana ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (*exposure*) dari setiap bahaya (*single hazard*) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (*multihazard*), dengan memperhatikan parameter-parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana. Indeks rawan dan risiko bencana di 35 kabupaten /kota di Jawa Tengah adalah tabel berikut.

Tabel 5
Indeks Bencana Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/	Indeks Rawan 2011	Indeks Risiko 2013
----	------------	-------------------	--------------------

	Kota	Skor	Kelas	Rangking Prov	Rangking Nas	Skor	Kelas	Rangking Prov	Rangking Nas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cilacap	132	Tinggi	1	17	215	Tinggi	1	132
2	Banyumas	123	Tinggi	2	36	207	Tinggi	5	123
3	Purbalingga	62	Tinggi	28	226	159	Tinggi	17	62
4	Banjarnegara	75	Tinggi	23	289	150	Tinggi	19	75
5	Kebumen	113	Tinggi	3	49	203	Tinggi	7	113
6	Purworejo	91	Tinggi	13	18	215	Tinggi	2	91
7	Wonosobo	105	Sedang	5	358	135	Tinggi	27	105
8	Magelang	94	Sedang	11	326	143	Tinggi	23	94
9	Boyolali	92	Tinggi	12	227	159	Tinggi	18	92
10	Klaten	106	Sedang	4	414	123	Tinggi	30	106
11	Sukoharjo	82	Sedang	16	482	93	Tinggi	33	82
12	Wonogiri	89	Tinggi	14	313	146	Tinggi	22	89
13	Karanganyar	102	Sedang	8	388	130	Tinggi	29	102
14	Sragen	76	Sedang	21	334	142	Tinggi	26	76
15	Grobogan	75	Tinggi	22	220	162	Tinggi	16	75
16	Blora	58	Tinggi	31	290	150	Tinggi	20	58
17	Rembang	77	Tinggi	19	164	172	Tinggi	12	77
18	Pati	98	Tinggi	10	153	174	Tinggi	11	98
19	Kudus	78	Sedang	18	378	132	Tinggi	28	78
20	Jepara	105	Tinggi	6	209	163	Tinggi	15	105
21	Demak	69	Tinggi	26	95	184	Tinggi	8	69
22	Semarang	103	Sedang	7	327	143	Tinggi	24	103
23	Temanggung	70	Sedang	25	328	143	Tinggi	25	70
24	Kendal	73	Tinggi	24	190	167	Tinggi	14	73
25	Batang	62	Tinggi	29	175	168	Tinggi	13	62
26	Pekalongan	76	Tinggi	20	97	183	Tinggi	10	76
27	Pemalang	78	Tinggi	17	37	206	Tinggi	6	78
28	Tegal	64	Tinggi	27	26	213	Tinggi	3	64
29	Brebes	101	Tinggi	9	29	211	Tinggi	4	101
30	Kota Magelang	44	Sedang	34	459	108	Tinggi	32	44
31	Kt Surakarta	60	Sedang	30	490	80	Tinggi	35	60
32	Kota Salatiga	34	Sedang	35	485	91	Sedang	34	34
33	Kt Semarang	87	Tinggi	15	96	184	Tinggi	9	87
34	Kt Pekalongan	52	Tinggi	32	306	148	Tinggi	21	52
35	Kota Tegal	132	Sedang	33	441	117	Tinggi	31	46

Sumber : BNPB

BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menilai potensi ancaman bencana, telah melakukan upaya pendataan/inventarisasi daerah rawan bencana yang sering terjadi di Jawa Tengah. Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa daerah rawan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi termasuk banyaknya masyarakat yang menempati daerah tersebut. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah menurut wilayah dan jumlah KK sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6
Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah

No	Bencana	Kab		Kec		Desa/Kel		KK	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banjir	30	85,71	334	58,20	1.719	20,08	743.264	7,70
2	Longsor	29	82,85	335	58,46	1.594	24,9	642.001	6,4
3	Kekeringan	26	74,28	219	38,2	1.314	15,3	677.952	6,8
4	Angin puting beliung	15	42,85	132	23	752	8,8	282.212	2,9
5	Gempabumi	21	37,14	114	19,9	1.499	17,5	1.416.145	15,1
6	Tsunami	4	11,42	20	3,5	127	1,5	128.186	1,3
7	Gunung api	23	31,42	47	8,2	276	3,2	200.634	2,1
8	Gas Beracun	3	8,57	13	2,3	44	0,5	33.744	1,3
9	Kebakaran Hutan/Lahan	22	62,85	122	21,3	749	8,7	169.498	1,7

Sumber : BPBD Jawa Tengah 2016

Kejadian dan dampak bencana di Jawa Tengah cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain. Jumlah kejadian bencana dan dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan selama 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 7
Kejadian dan Taksiran Kerugian Akibat Bencana

No	Jenis Bencana	2015		2016		2017		2018	
		Jml	Kerugian	Jml	Kerugian	Jml	Kerugian	Jml	Kerugian
1	Angin	308	3.440.523	419	7.648.565	490	8.016.727	407	5.445.666
2	Banjir	176	4.363.460	298	1.914.023.342	270	7.731.340	171	2.924.463
3	Tanah Longsor	491	6.220.084	927	185.627.303	1.091	21.025.867	555	5.111.986
4	Kekeringan	23	4.116.000	-	-	-	-	26	4.311.250
5	Kebakaran	572	34.040.002	468	1.127.741.291	600	40.622.373	589	33.866.505
6	Gempa Bumi	3	36.000			11	9.771.788	3	65
7	Letusan Gn. Api					1	-	5	-
8	Lainnya					-	-	4	-
	TOTAL	1.573	52.216.069	2.112	3.235.040.501	2.463	87.168.095	1.760	51.724.870

Catatan : Kerugian dalam ribu rupiah

Potensi bencana di Jawa Tengah yang cukup tinggi baik jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana. Upaya untuk meningkatkan kesadaran serta

pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur.

Pengembangan dan pemutakhiran pengkajian risiko bencana BNPB terus dilakukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian-capaian penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan dan pemutakhiran kajian risiko bencana meliputi data yang digunakan, metodologi pengkajian, penamaan dan lingkup pengkajian terhadap bencana. Pengkajian bencana konflik sosial pada tahun 2011 tidak dilakukan pengkajiannya kembali di tahun 2015. Hal ini dikarenakan bencana tersebut tidak termasuk ranah kerja atau kewenangan BNPB, namun masuk pada wewenang lembaga lainnya. Sementara jenis bencana banjir bandang merupakan jenis bencana yang menjadi kajian baru di tahun 2015. Lingkup kajian tersebut disesuaikan dengan kerangka acuan kerja dari BNPB. Selain itu, pengembangan juga dilakukan untuk penamaan dan metodologi pengkajian yang disesuaikan lembaga terkait di tingkat nasional.

Pengkajian risiko bencana didasarkan pada Peraturan Kepala BNPB No. 02 Tahun 2012 dan referensi pedoman yang ada di kementerian/ lembaga terkait lainnya di tingkat nasional. Dengan berdasarkan legalitas peraturan tersebut, penyusunan difokuskan pada jenis-jenis bencana yang berpotensi di Provinsi Jawa Tengah, dengan menghasilkan tingkat dan risiko masing-masing bencana. Hasil kajian risiko bencana BNPB yang meliputi risiko bahaya, kerentanan, kapasitas untuk periode tahun 2016-2020 adalah sbb:

Tabel 8
Indeks Kelas Bahaya dan Kerentanan

No	Jenis Bencana	Bahaya		Kerentanan			
		Luas	Indeks	Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan lingk	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Epidemi dan Wabah Penyakit	117.839	Sedang	Tinggi	-	-	Tinggi
2	Kekeringan	3.249.799	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
3	Kegagalan Teknologi	8.137	Tinggi	Tinggi	-	-	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	2.437.444	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
5	Gempa Bumi	3.249.796	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	664.838	Tinggi		Sedang	-	-
7	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	18.002	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Banjir	1.875.623	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

No	Jenis Bencana	Bahaya		Kerentanan			
		Luas	Indeks	Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan lingk	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Banjir bandang	82.054	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
10	Tanah Longsor	678.738	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
11	Tsunami	21.083	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12	Letusan Gn Api Sumbing	33.130	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
13	Letusan G.Api Sindoro	24.397	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
14	Letusan G.Api Merapi	30.305	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
15	Letusan G.Api Slamet	19.042	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
16	Letusan G.Api Dieng	4.202	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020, BNPB 2015

Tabel 9
Indeks Kelas Kapasitas

No	Prioritas	Nilai Prioritas	Indeks Prioritas
1	2	3	4
1	Memastikan Bahwa Prb Menjadi Sebuah Prioritas Nasional Dan Lokal Dengan Dasar Kelembagaan Yang Kuat Untuk Pelaksanaannya	58.56	3
2	Mengidentifikasi, Mengkaji Dan Memantau Risiko Bencana Dan Meningkatkan Peringatan Dini	42.88	2
3	Menggunakan Pengetahuan, Inovasi Dan Pendidikan Untuk Membangun Suatu Budaya Keselamatan Dan Ketahanan Di Semua Tingkat	45.52	2
4	Mengurangi Faktor-Faktor Risiko Yang Mendasar	57.26	3
5	Memperkuat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Demi Respon Yang Efektif Di Semua Tingkat	57.35	3
	Jumlah Total	52.31	
	Indeks Ketahanan Daerah	3	

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020, BNPB 2015

Nilai kapasitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendasarkan tabel di atas adalah **52,31** sehingga berada pada **level 3**. Pencapaian terhadap level tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan komunitas terkait pengurangan risiko bencana telah memiliki komitmen sehingga beberapa indicator telah tercapai dan didukung dengan kebijakan yang sistematis. Namun demikian, capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif bencana.

Sebagai tindak lanjut hasil penghitungan indeks ketahanan daerah dalam PB, pencapaian upaya penanggulangan bencana di Provinsi Jawa

Tengah masih perlu ditingkatkan minimal satu level di atas saat ini. Pencapaian tersebut dimaksudkan dengan mempertahankan pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah ada dan memperkuatnya melalui komitmen dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah secara lebih menyeluruh dalam upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah.

BPBD Prov Jawa Tengah telah melakukan berbagai dalam upaya pengurangan risiko bencana periode s.d tahun 2017 antara lain:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Tersusun Peta risiko bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- b. Pembentukan 103 (seratus tiga) desa tangguh bencana dengan rincian 68 (enam puluh delapan) desa tangguh bencana melalui APBD Prov Jawa Tengah dan 21 Desa tangguh bencana melalui APBN (BNPB) dan 14 desa tangguh bencana melalui LSM/NGO
- c. Rambu jalur evakuasi sebanyak 480 unit di 12 Kabupaten rawan bencana (erupsi gunung api, tsunami, dan tanah longsor)
- d. Gladi manajemen bencana dilaksanakan setiap tahun di 6 kab/kota
- e. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F PRB)

2. Penanganan Darurat

Tujuan dan sasaran: Meningkatkan Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Simulasi dan Gladi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat relawan, telah melatih lebih dari 15.000 orang masyarakat/relawan
- b. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi, dilaksanakan 3 kali setiap tahun dengan diikuti oleh 4.500 orang dari para pemangku kepentingan terkait
- c. Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
Melaksanakan, menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana
- d. SAR Pada Event Tertentu dan Hari-Hari Khusus
Wujud antisipasi dan partisipasi BPBD Jawa Tengah dalam berbagai event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun

keagamaan terutama pada event lebaran, sura/sedekah laut dan terlibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru.

e. Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana

Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kab/Kota se Jawa Tengah
- b. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana untuk penanganan banjir dan tanah longsor yang merupakan bencana yang rutin/musiman terjadi di Jawa Tengah
- c. Pelatihan Teknis Penilaian *Damage and Losses Assesment* dan kajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA). Melatih apatarur pemerintah agar mampu melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana sehingga laporan dampak bencana disertai kerusakan dan kerugian
- d. Penyelenggaraan rapat koordinasi serta pendampingan bagi masyarakat dan aparatur dalam proses pembangunan kembali terutama rehabilitasi sarana dan prasarana terdampak bencana
- e. Sinergi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pacabencana di Jawa Tengah

4. Logistik dan Peralatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, Pengadaan logistik dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap terdapat potensi ancaman bencana. Logistik difungsikan sebagai antisipasi dan *buffer stock* logistik penempatannya di Kabupaten /Kota untuk mempermudah mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana.
- b. Koordinasi, Konsolidasi Logistik Bencana; dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar kab/ kota

c. Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB

Monitoring dan evaluasi Peralatan sarana dan prasarana PB Bencana dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar pengelolaan peralatan bencana sesuai dengan standar dan memenuhi kriteria yang aman penyimpanan

d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng

Merupakan upaya peningkatan kapasitas peralatan dan kelembagaan serta sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan.

Tabel 10
Evaluasi Kinerja BPBD Prov Jawa Tengah 2013-2018

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET RENCANA OPD					Realisasi					Rasio				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1) Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai																
(1.1) Tersusunnya Peraturan/Pedoman bidang PB	(1.1.1) jumlah Peraturan/pedoman dalam PB di Jawa Tengah	0	0	1	1		1	2	1	0						
	(1.1.2) Jumlah Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi BPBD Kab/Kota di Jateng	28	1	1	1		3 (28)	3 (31)	2 (33)	- (33)						
(1.2) Tersusunnya dokumen Penyelenggaraan PB Jawa Tengah	(1.2.1) Tersusunnya pedoman penanganan darurat bencana	0	0	1	0		1	4	2	1						
	(1.2.2) Tersusunnya kesepahaman Penyeleng-garaan PB lintas sektor dan lintas wilayah	0	0	0	1		0	1	1	1						
	(1.2.3) Tersusunnya system manajemen logistik PB	0	0	0	1		0	0	0	1						
	(1.2.4) Tersusunnya system manajemen peralatan PB	0	0	0	1		0	0	0	1						
(2) Meningkatkan kapasitas sumber daya dan sarpras yang handal dalam penanggulangan bencana																
(2.1) Terpenuhiya sumber daya yang siap dalam penanggulangan bencana	(2.1.1) Jumlah kursus dan diklat teknis, PB, manajerial dan pendukung PB yang dilaksanakan/ diikuti	10	10	10	10			26		15						
	(2.1.2) Jumlah aparatur terlatih dalam penyelenggaraan PB	500	500	500	500											
(2.2) Terpenuhiya sarana dan prasarana penanggulangan	(2.2.1) jumlah tambahan sarana dan prasarana transportasi/ evakuasi	5	5	5	5		5	5	5	5						

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET RENCANA OPD					Realisasi					Rasio				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
bencana	(2.2.2) tersedia gedung/ gudang penyimpanan logistik dan peralatan pb	0	0	1	0		0	0	1	0						
	(2.2.3) jml paket logistik pengungsian	0	800	1000	1200		500	1000	1500	1000						
	(2.2.4) Pemulihan sarana dan prasana terdampak bencana	35	35	35	35		35	35	35	35		100	100	100	100	
	(2.2.5) Penguatan & Sinergi Kelembagaan PB Jateng	0	5	5	5		0	5	5	5						
(3) Meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana																
(3.1)Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bahaya	(3.1.1) Jumlah masyarakat /relawan terlatih PB	0	5.000	5.000	5.000		2.000	4.500	4.500	4.500						
	(3.1.2) Jumlah masyarakat/relawan mempunyai sertifikasi / keterangan pelatihan	0	0	100	150		100	100	100	150						
(4) Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm PB																
(4.1) terwujudnya kemandirian masy dalm peny PB	(4.1.1) Jumlah desa siaga bencana	2	2	2	3		2	2	2	0						
	(4.1.2) Jumlah desa tangguh bencana	0	0	4	4		0	0	8	8						
(5) Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para pemangku kepentingan penanggulangan bencana																
(5.1) Terbentuknya jejaring dan kerjasama kelompok / komunitas masyarakat, dunia usaha, dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana	(5.1.1) jumlah kerjasama PB dengan lembaga penelitian /perguruan tinggi ;	2	2	2	2		2	2	2	2						
	(5.1.2) jumlah komunitas peduli bencana,	0	10	13	15		2									
	(5.1.3) jmlh dunia usaha terlibat PB melalui CSR	0	3	10	15											
	(5.1.4) Penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah	0	3	3	3		3	3	3	3						
	(5.1.5) Jumlah media public-kasi data dan informasi PB	3	3	3	3		3	3	3	3						

SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET RENCANA OPD					Realisasi					Rasio				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(6) Memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan PB																
(6.1) Tersedianya pusat data infor-masi bencana, basis data dan informasi bencana jateng terkini	(6.1.1) Tersedia data dan informasi bencana	1	1	1	1		1	1	1	1						
	(6.1.2) Tersedia data dan informasi kerusakan / kerugian jateng,	1	1	1	1		1	1	1	1						
(6.2)Termanfaatkannya teknologi tepat guna untuk PB dg memperhatikan kearifan lokal	(6.2.1) System early warning masyarakat	0	1	2	2		0	0	2	2						
	(6.2.2) Jumlah publikasi di media	100	100	100	100		150	150	150	150						
(7) Meningkatkan sinergitas perencanaan-an pembangunan dengan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan																
(7.1)Terintegrasinya dok. Rencana Penanggulangan Bencana (umum dan tematik) dalam dokumen rencana pembangunan daerah	(7.1.1) Tersusunnya Rencana PB Jawa Tengah	0	0	1	0		0	1	1	0						
	(7.1.2) Terusunnya dokumen / peta risiko bencana Jateng	5	5	6	6		5	5	6	6						

NO,	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		Realisasi		Rasio		ket
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
	Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam PB	Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana	8	8	8	8			
			Jumlah unit EWS terpasang	2	3	8	9			
			Jumlah kegiatan Gladi/simulasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana	3	3	4	4			
			Jumlah rambu Jalur Evakuasi terpasang	90	150	120	150			

NO,	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		Realisasi		Rasio		ket
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
			Jumlah kab /kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen bidang kebencanaan	8	8	8	8			
			Jumlah peserta/ komunitas PB yang terlibat dalam upaya PRB	15	15	15	15			
		Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Jumlah peserta Bintek SAR dan latgab	250	350	250	350			
			Jumlah peserta pelatihan TRC	150	150	150	150			
			Jumlah tangki bantuan air bersih	1,000	2,000	517	-			
		meningkatkan kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Jumlah peserta pelatihan Dala/ Jitu Pasna	60	80	60	60			
			Jumlah korodinasi dan konsolidasi rehab rekon	13	13	13	13			
			meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Jumlah paket logistik untuk masyarakat terdampak bencana	1,000	1,300	1200	1300		
Jumlah unit peralatan sarana prasarana PB	5			5	6	6				
Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja, dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah publikasi kebencanaan dan even pengurangan risiko bencana/ pembangunan		153	153	160	165				
	Jumlah data kejadian, kerusakan/ kerugian bencana		1	1	1	1				
	Jumlah peserta Kursus/diklat teknis dan pendukung PB		300	320	400	400				
	Jumlah kegiatan koordinasi, konsolidasi lintas sekor wilayah para pemangku kepentingan PB		8	8	8	8				

Tabel 11
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan BPBD Prov Jawa Tengah

NO	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp x 000)						Realisasi Anggaran Tahun (Rp x 000)						Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun						Rata-rata pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	BTL	5.470.986	8.326.709	9.499.459	8.978.059	8.582.707	7.810.538		6.566.552	8.597.047	8.641.825	7.940.137		-	78.86	90.50	96.25	92.51			
	B. Peg	5.470.986	8.326.709	9.499.459	8.978.059	8.582.707	7.810.538		6.566.552	8.597.047	8.641.825	7.940.137		-	78.86	90.50	96.25	92.51			
2	BL	14.245.600	18.556.028	27.603.094	15.608.914	11.281.000	26.758.000	14.212.881	17.808.369	25.114.096	14.880.792	10.630.807		99.77	95.97	90.98	95.34	92.92			
	- BI Peg	2.516.240	1.154.025	1.030.120	1.803.790	1.384.750	3.656.250				1.758.190			-	-	-	-	-			
	- BI B/J	10.924.060	14.030.003	19.773.518	13.303.756	9.775.250	19.864.950				12.626.453			-	-	-	-	-			
	- BI Modal	1.005.300	3.372.000	6.408.042	501.368	121.000	3.236.800				496.149			-	-	-	-	-			
	TOTAL BTL+BTI	19.916.586	26.882.737	36.711.139	24.586.973	21.848.843	34.568.538		24.374.921	33.711.143	23.522.618	18.570.944		-	90.67	91.83	95.67	92.71			

Pendanaan penanggulangan bencana dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, meskipun sempat mengalami penurunan, namun pendanaan kembali naik sesuai prioritas pembangunan daerah. Dari aspek rasio penyerapan anggaran rata-rata telah diatas 95 % dengan realisasi terbaik pada tahun 2013.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Tantangan

a. Penanggulangan bencana sebagai isu global

Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

b. Kelembagaan penanggulangan bencana di daerah

UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan mengamanatkan bahwa disetiap daerah agar dibentuk BPBD baik BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah baru terbentuk 33 BPBD yang telah berdasarkan Perda, sehingga masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD, yaitu Kota Magelang dan Kota Salatiga. Sedangkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD, baru 16 dari 33 BPBD Perda yang telah mempunyai perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selain isu terkait dasar pembentukan lembaga, isu terkait anggaran dan personel BPBD juga menjadi tantangan tersendiri. Alokasi anggaran di 33 BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah relative masih kecil terutama alokasi anggaran belanja langsung. Sedangkan jumlah dan kapasitas personel BPBD juga belum ideal.

c. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana

Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah

pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.

d. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Jawa Tengah perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta sarana dan prasarana PB. Alokasi anggaran di BPBD Kabupaten/Kota untuk penyediaan stok logistic kebencanaan relative minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB. Dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan belum ideal dan masih harus dipertimbangkan kembali untuk optimalisasi pelayanan.

e. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan factor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain.

Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan

data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

f. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif

Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai factor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun social. Seringkali bencana yang terjadi disuatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana didaerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpadauan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan – permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Jateng
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- c. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Jateng No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- e. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;

- f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- h. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,
- l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

2. Peluang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan **melindungi lingkungan**. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kesepakatan global tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai

kesepakatan pembangunan global. Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut diwujudkan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tonggak utama yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. SDGs/TPB terdapat 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu:

a. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

b. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

c. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

d. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang

e. Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

f. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

g. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

h. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

i. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

j. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

k. Tujuan 11 - Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

l. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

- Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- m. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
 - Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Tujuan 14 - Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
 - Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- o. Tujuan 15 - Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
 - Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- p. Tujuan 16 - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
 - Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- q. Tujuan 17 - Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan
 - Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 75 indikator.

Tabel 12
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi LH
1	2	3
Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk	- Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan baik secara total maupun menurut jenis kelamin	Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi LH
1	2	3
kemiskinan	- dan kelompok umur - Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan - Penanganan kawasan permukiman kumuh - Kerugian ekonomi langsung akibat bencana	pada 11 kabupaten kota yang berada pada kategori cukup rentan.
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	- Penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/kapita/hari - Kualitas konsumsi pangan (skor pola pangan harapan) dan tingkat konsumsi ikan yang masih rendah	Penurunan lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	- Deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B - Obesitas pada Penduduk Usia 18+ - Akses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang merugikan - Penggunaan alat kontrasepsi dan kepesertaan KB aktif sebagai kontrol pertumbuhan penduduk - Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (Jumlah yang menerima Jamkesda) - Penduduk umur =15 tahun yang merokok	
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	- Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk seluruh tingkat pendidikan termasuk pra sekolah dasar dan perguruan tinggi - Angka melek huruf	
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	- Kebutuhan keluarga berencana /KB yang belum terpenuhi - Angka partisipasi kasar untuk seluruh tingkat pendidikan - Tenaga manajer, profesional, administrasi & teknisi perempuan - Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dan Unmeet need KB	

Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13
Capaian Indikator Pilar Sosial Perangkat Daerah

No	Dinas	Jumlah	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	BPJS	1	0	1	0	0

No	Dinas	Jumlah	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
2	BPBD	3	1	0	1	1
3	BPS	8	0	1	3	4
4	DINKES	21	18	0	1	2
5	DINSOS	2	2	0	0	0
6	BNN JATENG	5	3	1	1	0
7	DPPA DALDUKKB	10	5	4	1	0
8	DISDIKBUD	14	14	0	0	0
9	BKKBN	4	0	4	0	0
10	DISHANPAN	3	3	0	0	0
11	DPU BINMAR CIPKA	2	2	0	0	0
12	DISPERAKIM	1	1	0	0	0
13	DINAS ESDM	1	1	0	0	0
		75	50	11	7	7

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 44 indikator. Rumusan tujuan pada isu strategis TPB pilar lingkungan yang terkait dengan bencana, adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi Lingkungan Hidup
1	2	3
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Cakupan akses sanitasi layak, dengan meningkatkan desa /kelurahan Sanitasi Total - Berbasis Masyarakat (STBM) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) - Pengelolaan dan penyehatan DAS yang dapat meningkatkan jumlah mata air melalui konservasi sumber daya air	-Daya dukung air permukaan yang terlampaui -Jasa Ekosistem Penyedia air dalam kategori rendah (9.95%) -Jasa ekosistem pengatur iklim dalam kategori sedang (42.12%)
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Layanan penanganan sampah perkotaan - Kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil - Indeks Risiko Bencana (IRB) - Penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana tingkat daerah	-Layanan pengangkutan sampah keseluruhan kurang dari 30% dan khusus kawasan perkotaan berkisar 70-90% -38% TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, hanya 22% yang menggunakan sistem controlled landfill, sisanya masih open dumping -Jasa ekosistem

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi Lingkungan Hidup
1	2	3
		pengolahan dan pengurai limbah dalam kategori sedang (38,90%)
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Daur ulang sampah dan pengelolaan limbah B3	-38% TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, hanya 22% yang menggunakan sistem <i>controlled landfill</i> , -sisanya masih open dumping Jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah dalam kategori sedang (38,90%)
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya	- Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam melalui Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah akibat dampak perubahan iklim - Mengurangi korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana iklim	-Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 11 kabupaten kota yang berada pada kategori cukup rentan. -63% kawasan rawan bencana dengan jenis bencana beragam
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	- Melestarikan kawasan konservasi laut dan memberikan perlindungan terhadap nelayan - Kepatuhan pelaku usaha dalam penangkapan ikan	Belum tercapainya luasan ideal kawasan hutan bakau dan kawasan sempadan pantai
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi pengurangan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	- Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan - Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem - Pemulihan dan rehabilitasi kawasan konservasi terdegradasi dan lahan kritis	Belum tercapainya luasan ideal kawasan lindung untuk mata air, danau, sungai dan lindung bawahnya serta peningkatan kawasan perlindungan plasma nutfah

Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15
Capaian Indikator Pilar Lingkungan Perangkat Daerah

No	Dinas	Jumlah	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	DLHK	18	15	1	1	1
2	DISHUB	1	1	0	0	0
3	PUSDATARU	2	2	0	0	0

4	DINKES	2	0	0	2	0
5	DKP	3	0	1	0	2
6	BMCK	5	4	0	1	0
7	DINPORAPAR	1	0	0	0	1
8	BPBD	8	2	0	3	3
9	DISPERAKIM	1	1	0	0	0
10	ESDM	1	1	0	0	0
11	PERHUTANI	1	0	0	1	0
12	BMKG	1	1	0	0	0
		44	27	2	8	7

Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Jawa Tengah secara otomatis melekat pada BPBD Jawa Tengah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan membentuk BPBD melalui Peraturan daerah pada tahun 2008 melalui Peraturan daerah dan merupakan BPBD Provinsi yang pertama kali dibentuk. Dengan dibentuknya BPBD Provinsi Jawa Tengah maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang sebelumnya melekat pada Badan Kesbangpollinmas Jawa Tengah bergeser menjadi tugas pokok dan fungsi di BPBD Prov Jawa Tengah. Pergeseran tersebut tidak hanya pergeseran normative belaka, namun telah diikuti dengan pengalihan beberapa asset PB dan anggaran PB secara otomatis.

Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 tahun 2016 tentang pembentukan SOTK akan membawa perbaikan dalam pengelolaan bencana di daerah. Dengan adanya instruksi Gubernur dan Surat Edaran kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, serta advokasi untuk pembentukan BPBD diharapkan permasalahan kelembagaan akan dapat dikelola lebih baik. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB pada semua jenis bencana yang sinergi dengan rencana pembangunan dan pada tingkatan yang lebih teknis dipersiapkan pula dokumen tentang rencana kontinjensi bencana.

Peran BPBD Prov Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Jateng, maka BPBD Prov Jawa Tengah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Prov Jawa Tengah memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas ESDM dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD Prov Jawa Tengah mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incident commander*, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

UU No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 mengatur tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Mendasarkan hal tersebut lembaga asing dan non pemerintah dapat mengambil peran dalam Penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat regional (Kawasan ASEAN) pada tahun 2015 diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, diantaranya terdapat beberapa kerjasama strategis antara lain:

- a. Penanggulangan Ancaman Flu Burung dan yang sejenis,
- b. Kerangka Kerja Multi Sektoral ASEAN dalam Bidang Perubahan Iklim
- c. Ketahanan Pangan.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting.

Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi

dan mitigasi dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (Lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

a. Legislasi,

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraruran pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB.

Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjukan teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi

2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :

a) rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran

b) Rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan

c) rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

c. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal.

Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun *Hyogo Framework for Action (HFA) reporting* (ini adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).
 - 2) Tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal: perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.
 - 3) Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi erupsi G. Merapi dibentuk Forum Merapi, dst
- d. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas

e. Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Pendanaan dari pemerintah.

Mendasarkan pada peruntukannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus,
- b. Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi
- c. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;

Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai; dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti

- pengadaan logistik, aktivasi posko 24jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll
- d. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Belanja Hibah daerah yang digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*)
- 2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.
- Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, SKPD teknis terkait kebencanaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama BPBD Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana yang dikelola oleh OPD teknis lain. Hasil koordinasi dengan lintas SKPD, terdapat 16 (enam belas) OPD selain BPBD Prov Jawa Tengah yang mempunyai kaitan dengan penanggulangan bencana. Data OPD pengelola /pengampu dana kebencanaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16
Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah

No	SKPD PROV JAWA TENGAH	TA 2013	2014 (x.000,-)	2015 (x.000,-)	2016 (x.000,-)
1	2	3	4	5	6
1	BPBD	12.755.000	10.967.068	10.228.750	10.472.393
2	Badan Lingkungan Hidup	750.000	1.875.000	9.586.409	2.141.059
3	Bakorwil I	1.000.000	900.000	631.042	675.000
4	Bakorwil II	1.035.475	1.100.000	1.037.540	540.500
5	Bakorwil III	850.000	700.000	599.672	413.566
6	Badan Ketahanan Pangan		1.175.000	1.580.000	1.482.000
7	Badan Kesbangpolinmas			3.128.250	2.669.300
8	Badan Pemberdayaan Masya-	101.362	100.000		

No	SKPD PROV JAWA TENGAH	TA 2013	2014 (x.000,-)	2015 (x.000,-)	2016 (x.000,-)
1	2	3	4	5	6
	rakat Dan Desa				
9	Din Sosial	890.000	1.100.000	1.400.000	1.500.000
10	Din Kesehatan	950.000	1.250.000	2.000.000	950.000
11	Din Pendidikan	1.096.250	1.161.650	750.000	127.781
12	Din ESDM	900.000	10.650.000	10.240.500	10.387.546
13	Din PSDA	4.525.000	2.165.700	9.219.412	12.556.981
14	Din Cipta Karya Dan TataRuang	3.500.000	3.600.000	1.939.442	50.050
15	Din Bina Marga	3.000.000	5.794.756	4.917.576	746.655
16	Din Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	200.000	200.000	1.300.000	1.750.000
17	Din Kehutanan			15.950	1.470.000
18	Din Peternakan dan Kesehatan Hewan			562.375	1.347.250
19	RS Muwardi Surakarta	50.000			
20	Biro Keuangan Setda Prov Jateng (Dana Tak Terduga Gubernur untuk bantuan Korban Bencana)	37.894.000	37.500.000	37.500.000	46.667.750
21	Biro Bina Sosial Setda Prov Jateng	435.000	400.000	166.397	259.695
	JUMLAH (dana PB Jateng)	69.932.087	80.639.174	96.039.710	94.004.011
	APBD JAWA TENGAH	12.093.602.761	16.038.948.597	17.097.686.334	21.155.201.299
	Dana PB : APBD Jateng	0.005 (0,57 %) 1 : 200	0.005 (0,50 %) 1 : 200	0.006 (0,56 %) 1 : 200	0.004 (0,44 %)

Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	SKPD PROV JAWA TENGAH	Anggaran (.000)
1	2	3
1	BPBD	7.621.000
2	Badan Kesbangpol	825.200
3	Dinas Sosial	1.200.000
4	Dinas Kesehatan	3.251.946
5	Dinas Pendidikan	440.524
6	Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM)	6.120.618
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dan Penataan Ruang	99.877.969
8	Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya	11.078.845
9	Dinas Pertanian	2.000.000

No	SKPD PROV JAWA TENGAH	Anggaran (.000)
1	2	3
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	150.000
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.459.700
12	Biro Kesra Setda Prov Jateng	209.000
	JUMLAH (dana PB Jateng)	134.234.802

Alokasi Dana PB Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2017

No	TA	ANGGARAN	APBD	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3/4 x 100%
1	2013	69.932.087.000	13.343.358.327.000	0.52
2	2014	84.808.624.000	15.159.741.864.000	0.55
3	2015	96.803.315.585	17.097.686.334.000	0.56
4	2016	96.207.526.000	21.155.201.299.000	0.45
5	2017	134.234.802.000	23.955.179.003.000	0.56

Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha
- 2) Terbitnya UU no 23 tahun 2014 beserta peraturan pemerintah pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota
- 3) Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien
- 4) Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak
- 5) Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi

- 6) Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat didaerah memungkinkan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian / lembaga teknis. pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta
- 8) Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal.
- 9) Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. lembaga nasional maupun internasional
- 10) Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1 %) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat
- 11) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan , pengawasan , dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimibigan teknis, pelatihan , kursus , dll
- 12) Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik
- 13) Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodic
- 14) Perlunya pengarusutamaan paradigm pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana
- 15) Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP. indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Prov Jateng

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kesepakatan global tersebut dilaksanakan dalam pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan

global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals (MDGs)*, SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut diwujudkan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tonggak utama yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. SDGs/TPB terdapat 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu:

r. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

s. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

t. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

u. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang

v. Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

w. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

x. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

y. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.

z. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

aa. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

bb. Tujuan 11 - Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

cc. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

dd. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

ee. Tujuan 14 - Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan

Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

ff. Tujuan 15 - Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

gg. Tujuan 16 - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif

hh. Tujuan 17 - Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian indikator TPB terbagi dalam indikator nasional dan provinsi. Terdapat 209 indikator TPB yang menjadi kewenangan provinsi dan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 191 indikator, dimana 105 indikator telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 15 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 44 indikator yang belum dilaksanakan dan 27 indikator belum ada datanya.

Pengategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di provinsi Jawa tengah pada periode RPJMD berikutnya yaitu 2018 – 2023. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak ada datanya.

Capaian indikator TPB Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional diperoleh masing-masing capaian sebagai berikut.

a. Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 105 indikator atau 55% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh yaitu sebanyak 17 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 16 indikator, tujuan 1 tanpa kemiskinan 13 indikator dan tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak sebanyak 13 indikator.

b. Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 15 indikator atau 8% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Indikator paling banyak dalam kategori ini adalah oleh tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dan tujuan 3

kehidupan sehat dan sejahtera dengan indikator masing-masing sejumlah 4 indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target.

c. Target TPB yang memiliki data tetapi belum menjadi target (TT)

Indikator ini selama ini telah memiliki data pada masing-masing OPD yang mampu kegiatan terkait, tetapi dengan berbagai pertimbangan belum menjadi indikator dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 27 indikator atau 14% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Indikator paling banyak dalam kategori ini adalah oleh tujuan 8 yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak sebanyak 6 indikator. Selanjutnya indicator terbanyak berikut adalah indikator tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak sebanyak 4 indikator yang memiliki data tetapi belum menjadi target di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

d. Target TPB yang belum ada data (NA)

Indikator ini tidak ada data yang dapat mendukung penjelasan capaiannya. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 44 indikator atau 23% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Indikator paling banyak kategori ini adalah oleh tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh sebanyak 8 indikator. Selanjutnya indikator terbanyak berikut adalah indicator tujuan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan sebanyak 6 indikator, tujuan 8 pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak sebanyak 5 indikator dan tujuan 9 infrastruktur, industri dan inovasi sebanyak 5 indikator.

Tabel 17
Tujuan dan Status Capaian Indikator

No	TPB	Jumlah Indikator	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanpa Kemiskinan	19	13	4	1	1
2	Tanpa Kelaparan	8	7	0	0	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	25	16	4	2	3
4	Pendidikan Berkualitas	13	10	0	2	1
5	Kesetaraan Gender	10	6	1	2	1
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17	13	0	4	0
7	Menjamin Akses Energi	5	2	0	0	3
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	14	3	0	6	5
9	Infrastruktur, Industri dan	8	1	1	1	5

No	TPB	Jumlah Indikator	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
	Inovasi					
10	Mengurangi Kesenjangan	8	3	1	1	3
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	12	7	0	1	4
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	4	0	0	0
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	1	0	2	0
14	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim	3	0	1	0	2
	SS : Dilaksanakan Mencapai Target SB: Dilaksanakan Belum Target		TT: Ada Data Tidak Ada Target N/A: Tidak Ada Data			

BPBD Prov Jawa Tengah sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa indiklktor yang harus terpenuhi, yaitu terkait dengan pilar social dan pilar lingkungan.

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 75 indikator.

Tabel 18
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi LH
1	2	3
Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk kemiskinan	- Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan baik secara total maupun menurut jenis kelamin dan kelompok umur - Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan - Penanganan kawasan permukiman kumuh - Kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 11 kabupaten kota yang berada pada kategori cukup rentan.
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	- Penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/kapita/hari - Kualitas konsumsi pangan (skor pola pangan harapan) dan tingkat konsumsi ikan yang masih rendah	Penurunan lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	- Deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B - Obesitas pada Penduduk Usia 18+ - Akses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang	

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi LH
1	2	3
	- merugikan - Penggunaan alat kontrasepsi dan kepesertaan KB aktif sebagai kontrol pertumbuhan penduduk - Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (Jumlah yang menerima Jamkesda) - Penduduk umur =15 tahun yang merokok	
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	- Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk seluruh tingkat pendidikan termasuk pra sekolah dasar dan perguruan tinggi - Angka melek huruf	
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	- Kebutuhan keluarga berencana /KB yang belum terpenuhi - Angka partisipasi kasar untuk seluruh tingkat pendidikan - Tenaga manajer, profesional, administrasi & teknisi perempuan - Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dan Unmeet need KB	

Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19
Capaian Indikator Pilar Sosial Perangkat Daerah

No	Dinas	Jumlah	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	BPJS	1	0	1	0	0
2	BPBD	3	1	0	1	1
3	BPS	8	0	1	3	4
4	DINKES	21	18	0	1	2
5	DINSOS	2	2	0	0	0
6	BNN JATENG	5	3	1	1	0
7	DPPA DALDUKKB	10	5	4	1	0
8	DISDIKBUD	14	14	0	0	0
9	BKKBN	4	0	4	0	0
10	DISHANPAN	3	3	0	0	0
11	DPU BINMAR CIPKA	2	2	0	0	0
12	DISPERAKIM	1	1	0	0	0
13	DINAS ESDM	1	1	0	0	0
		75	50	11	7	7

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 44 indikator. Rumusan tujuan pada isu strategis TPB pilar lingkungan yang terkait dengan bencana, adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi Lingkungan Hidup
1	2	3
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Cakupan akses sanitasi layak, dengan meningkatkan desa /kelurahan Sanitasi Total - Berbasis Masyarakat (STBM) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) - Pengelolaan dan penyehatan DAS yang dapat meningkatkan jumlah mata air melalui konservasi sumber daya air	-Daya dukung air permukaan yang terlampaui -Jasa Ekosistem Penyedia air dalam kategori rendah (9.95%) -Jasa ekosistem pengatur iklim dalam kategori sedang (42.12%)
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Layanan penanganan sampah perkotaan - Kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil - Indeks Risiko Bencana (IRB) - Penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana tingkat daerah	-Layanan pengangkutan sampah keseluruhan kurang dari 30% dan khusus kawasan perkotaan berkisar 70-90% -38% TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, hanya 22% yang menggunakan sistem controlled landfill, sisanya masih open dumping -Jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah dalam kategori sedang (38,90%)
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Daur ulang sampah dan pengelolaan limbah B3	-38% TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, hanya 22% yang menggunakan sistem <i>controlled landfill</i>, -sisanya masih open dumping - Jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah dalam kategori sedang (38,90%)
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya	- Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam melalui Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah akibat dampak perubahaniklim - Mengurangi korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana iklim	-Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 11 kabupaten kota yang berada pada kategori cukup rentan. -63% kawasan rawan bencana dengan jenis bencana beragam
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber	- Melestarikan kawasan konservasi laut dan memberikan perlindungan	Belum tercapainya luasan ideal kawasan hutan bakau dan kawasan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi Lingkungan Hidup
1	2	3
daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	terhadap nelayan - Kepatuhan pelaku usaha dalam penangkapan ikan	sempadan pantai
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	- Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan - Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem - Pemulihan dan rehabilitasi kawasan konservasi terdegradasi dan lahan kritis	Belum tercapainya luasan ideal kawasan lindung untuk mata air, danau, sungai dan lindung bawahnya serta peningkatan kawasan perlindungan plasma nutfah

Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21
Capaian Indikator Pilar Lingkungan Perangkat Daerah

No	Dinas	Jumlah	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	DLHK	18	15	1	1	1
2	DISHUB	1	1	0	0	0
3	PUSDATARU	2	2	0	0	0
4	DINKES	2	0	0	2	0
5	DKP	3	0	1	0	2
6	BMCK	5	4	0	1	0
7	DINPORAPAR	1	0	0	0	1
8	BPBD	8	2	0	3	3
9	DISPERAKIM	1	1	0	0	0
10	ESDM	1	1	0	0	0
11	PERHUTANI	1	0	0	1	0
12	BMKG	1	1	0	0	0
		44	27	2	8	7

Tabel 22
Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023

Awal	No. Target	Target	Indikator	Sumber data	Capaian			Target TPB		Rate		Target 2023
					Satuan	2015	2017	Target	2030	Ex Bau	TPB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PILAR LINGKUNGAN												
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
TT	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD	Indeks	-	-	Turun	30%			
TT	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	%	-	11,00	Naik	100,00	5,50	6,85	52,08
TT	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	BPBD	Dokumen	0	4	Naik	35	2	2	18
PILAR SOSIAL												
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN												
TT	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	BPBD	Dokumen	0	1	Ada	1	-	-	1

Tabel 23
Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan upaya tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung

No	TARGET TPB	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2023	INSTANSI
1	2	3	4	5
PILAR LINGKUNGAN				
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.5 .1(a)	Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin, dan orang-orang dalam situasi rentan	- Belum terpetakannya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai indikator tingkat risiko bencana pada masing-masing Kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Perlunya penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk masing-masing kabupaten Kota di Jawa Tengah sebagai Baseline indicator dalam pengelolaan Risiko bencana Yang di update setiap tahun - Menurunkan indeks risiko bencana sebanyak 30% dari baseline IRB kabupaten kota di Jawa Tengah Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengah melalaui peningkatan tutupan hutan	BPBD
11.b .1*	Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	- Masih sedikitnya kabupaten kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana yaitu 4 kabupaten kota atau 11 % dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Memfasilitasi penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana di Kabupaten kota terutama yang memiliki Indeks Rawan Bencana Tinggi minimal sampai dengan 18 kabupaten kota atau 52% dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah - Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengah melalaui peningkatan tutupan hutan	BPBD DLHK DISPERKI M DKP

No	TARGET TPB	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2023	INSTANSI
1	2	3	4	5
	PILAR SOSIAL	-	-	
1.5.3*	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	- Masih sedikitnya kabupaten kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana yaitu 4 kabupaten kota atau 11 % dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Memfasilitasi penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana di Kabupaten kota terutama yang memiliki Indeks Rawan Bencana Tinggi minimal sampai dengan 18 kabupaten kota atau 52% dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah - Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengahmelalui peningkatan tutupan hutan	BPBD

Tabel 24
Indikator SDGs dalam Renstra

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	SKPD
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN				
1.5.1 (e)		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD
1.5.3*		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	BPBD
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.5.1.(b)(*)		Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	BPBD
11.5.1.(c)		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD

BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008. BPBD Prov Jawa Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Prov Jawa Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Prov. Jawa Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Prov Jawa Tengah jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Identifikasi permasalahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana tinggi	Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	Aktivitas masyarakat tidak ramah lingkungan
			Lemahnya penegakan RTRW
			Masih terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jateng
			Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
		Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparat dalam upaya PRB	Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang PB di Prov Jawa Tengah
			Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan PB di Jawa Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Belum sinerginya penyelenggaraan PB lintas sektor dan lintas wilayah
			Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan PB di Jawa Tengah

B. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

- Visi Jawa Tengah 2018-2023

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan *tepo seliro*; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan public, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah. Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- a. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah. agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- b. Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan. Teknologi, kearifan local, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim. untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- c. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “(*tetep*) *Mboten Korupsi. Mboten Ngapusi*” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “(*tetep*) *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

2. Misi Jawa Tengah 2018 - 2023

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

3. Program Kerja

Program kerja unggulan yang akan dilaksanakan tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- a. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK.

- b. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji.
- c. Reformasi birokrasi di kab/kota, sistem layanan terintegrasi.
- d. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
- e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
- f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
- g. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
- h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
- i. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
- j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Permasalahan ancaman bencana dipengaruhi faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia. Disamping itu besarnya jumlah penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dan pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, menjadi salah satu pendukung terhadap berbagai macam bencana baik yang disebabkan oleh alam non alam maupun ulah manusia. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan penanggulangan bencana, antara lain:

- a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana. Dengan diterbitkannya Undang-

Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana PB, mengakibatkan penyelenggaraan PB belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

- b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana PB melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Penyusunan Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) 2015-2019 mengacu pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, sebagai rencana pembangunan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 yaitu Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian, serta keberlanjutan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung fungsi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan lima tahun ke depan.

Renstra Ditjen BAK 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2015-2019 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen BAK dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan dilingkungan Ditjen BAK untuk secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan administrasi kewilayahan.

VISI “Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pernyataan visi tersebut, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut: Frase**“Terwujudnya ”** menunjukkan peran organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan negara dan sistem birokrasi negara berfungsi dengan baik. Frase **“Pembinaan Administrasi Kewilayahan”**, menunjukkan bahwa Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam

memantapkan penyelenggaraan tugas – tugas Pembinaan Administrasi Kewilayahan. Frase”**Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia**”, merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintah di daerah yang selalu harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini dapat berhasil bila ada jejaring internal maupun eksternal dalam kerangka global.

MISI Untuk mewujudkan visi, maka Ditjen Bina Administrasi Kewilyahan menetapkan misi untuk Tahun 2015-2019:

- a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi penataan wilayah perbatasan, wilayah administrasi dan nama rupabumi (toponimi);
- c. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kawasan dan otorita serta percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sasaran program, dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan adalah **Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran**, dengan indicator sasaran antara lain:

- a. Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar

- b. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar
- c. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
- d. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
- e. Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran
- g. Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kebakaran

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB mensikapi point-point penting antara lain:

- Urusan bersama. hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
- Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional)
- Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana
- Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi
- Membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana
- Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat. pendanaan yang memadai
- Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

a. Capaian Kinerja BNPB 2010-2014

1) Aspek Legislasi

Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BNPB

2) Aspek Kelembagaan

- a) Terbentuknya BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- BNPB dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri telah mendorong terbentuknya 462 BPBD, terdiri atas 34 BPBD provinsi, 71 BPBD kota, dan 357 BPBD kabupaten.
- b) Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana
- Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) sebagai wadah koordinasi yang beranggotakan perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ditingkat nasional.
 - Forum PRB sektoral, seperti Forum Perguruan Tinggi untuk PRB. Konsorsium Pendidikan Bencana, serta Forum Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - Forum PRB di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Forum PRB tematik, seperti Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue. Forum Multipihak DAS Ciliwung-Cisadane “Save Our Jakarta.” Forum Pengelolaan DAS Multipihak Sumbar. Forum Gunung Merapi. Forum Gunung Slamet. Jangkar Kelud. Forum DAS Bengawan Solo di Jateng dan Jatim, dan PASAG Merapi.
- c) Kemitraan DPR RI dengan BNPB
- DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka legislasi, penganggaran dan pengawasan merupakan mitra kerja Pemerintah. Melalui Komisi VIII. DPR RI telah banyak memberikan dukungan kepada BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari sisi legislasi. DPR RI adalah yang menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB
- d) Terjalinnya Kerjasama antar Lembaga
- Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk mendukung operasi penanganan darurat, melalui mobilisasi personel dalam Satuan Reaksi Cepat (SRC) PB maupun mobilisasi personel langsung ke daerah bencana. Dalam hal ini. TNI bergerak dalam operasi militer selain perang;
 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI untuk mendampingi pelaksanaan penganggaran penanggulangan bencana. khususnya dana siap pakai dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- Kementerian/lembaga lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat. dan dukungan pemulihan pascabencana sesuai dengan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi BNPB;
- Lembaga non pemerintah, antara lain Palang Merah Indonesia, perguruan tinggi, lembaga perbankan, lembaga usaha, serta LSM nasional. Sejak tahun 2009 - 2014 telah ditandatangani 44 nota kesepahaman kerjasama.

e) Terbangunnya Kerjasama dengan Masyarakat Internasional

- Kerjasama bilateral, regional, dan internasional dengan berbagai kalangan pemerintah dan organisasi internasional, antara lain Turki. Amerika Serikat, negara-negara ASEAN. India, Belarusia, Italia, Australia, dan Jepang, Australia. Swiss, Rusia, China, Selandia Baru. Maladewa. Taiwan.
- Dengan lembaga internasional, antara lain Pacific Disaster Center University of Hawaii, ADB, DFAT, USAID, WFP, UNDP, UNFPA, FAO, UN-OCHA, UNISDR, WHO, Bank Dunia, ADRC, ADPC, FEMA, NEMA, EMA, dan sebagainya.
- BNPB mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional yang diwujudkan dalam berbagai program /kegiatan. BNPB juga aktif mendukung ASEAN, ARF, EAS, dan kerjasama selatan-selatan.

f) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik

3) Aspek Perencanaan

- Terintegrasinya Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
- Tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
- Tersusunnya Masterplan PRB Tsunami
- Terintegrasinya PRB dalam Rencana Tata Ruang

4) Aspek Pendanaan

- Meningkatnya Alokasi Pendanaan Penanggulangan Bencana
Anggaran BNPB meningkat secara signifikan dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Dari total pagu indikatif Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sebesar Rp 1.4 triliun, terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.6 triliun atau meningkat 500%. Sebagai contoh tahun 2008.

DIPA BNPB sebesar Rp 91 milyar, dan pada tahun 2014 menjadi Rp 2.53 triliun atau meningkat 2.680 %.

b) **Fleksibilitas Penggunaan Dana Cadangan PB**

Selain pengalokasian anggaran melalui proses perencanaan pembangunan nasional. BNPB juga mendapatkan anggaran dari dana cadangan APBN rata-rata sebesar Rp 3 triliun per tahun sebagai dana siap pakai (*on call budget*) untuk penanganan darurat bencana

c) **Kinerja Pengelolaan Keuangan**

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran. Pada 2013 realisasi penggunaan anggaran mencapai 95,30% meningkat dibanding tahun sebelumnya 88,82%.

5) **Aspek Peningkatan Kapasitas**

a) **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM

Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB)

b) **Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana**

Terbangunnya Pusdalops PB

Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pembangunan Kantor BNPB

c) **Peningkatan Kapasitas Sistem Penyelenggaraan**

Tersusunnya Standarisasi Nasional Indonesia untuk PB

Tersusunnya Peta Sumber Daya Logistik dan Peralatan

Terbangunnya Aplikasi PB secara Daring

Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional PB

6) **Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

a) **Tahap Prabencana**

(1) **Terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana**

- Tahun 2012, terdapat 40 desa di 20 provinsi dengan ancaman tsunami mengikuti program ini.
- Tahun 2013, program desa tangguh dilakukan di 56 desa di 28 provinsi.

- Tahun 2014, jumlah desa peserta sebanyak 68 desa di 28 provinsi, di mana 10 provinsi masuk dalam program masterplan pengurangan risiko bencana tsunami.

(2) Tersusunnya Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana

Penyusunan rencana induk untuk 12 jenis ancaman bencana sebagai masukan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Adapun 12 rencana induk itu meliputi ancaman gempa bumi (ITB), tsunami (Unsyiah), gerakan tanah (UGM), letusan gunungapi (UPN Veteran), banjir (Undip), gelombang ekstim dan abrasi (Unand) dan cuaca ekstim (UI). Selain itu, ancaman kekeringan (dengan Udayana), epidemi dan wabah penyakit (Unair), banjir bandang (Unhas), kecelakaan industri (ITS) dan kebakaran lahan dan hutan (IPB).

- (3) Tersusunnya Indeks Rawan Bencana Indonesia
- (4) Terselenggaranya Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana
- (5) Inisiasi Deklarasi Yogyakarta
- (6) Tersedianya Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi
- (7) Terlaksananya Masterplan PRB Tsunami
- (8) Terselenggaranya Peringatan Bulan PRB
- (9) Terlaksananya Gladi Lapang Nasional
- (10) Tersusunnya Rencana Kontinjensi PB
- (11) Laporan Kajian Nasional tentang PRB
- (12) Terlaksananya Berbagai Forum Internasional PB
- (13) Partisipasi Aktif dalam Global Platform for DRR
- (14) Terbentuknya Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI)

b) Tahap Saat Tanggap Darurat

(1) Peningkatan Kapasitas TRC Daerah

Telah terbentuk sebanyak 33 tim reaksi cepat (TRC) di tingkat BPBD provinsi dan 127 TRC di BPBD kab/kota dan telah mengikuti pelatihan sejak tahun 2010.

- (2) Tersalurkannya Bantuan Bencana
- (3) Terlaksananya Teknologi Modifikasi Cuaca untuk PB
- (4) Membantu Negara Lain
- (5) Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Pengungsi

c) Tahap Pascabencana

- (1) Tersedianya Perangkat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- (2) Tersusunnya Perencanaan Pemulihan Pascabencana
- (3) Tersalurkannya Bantuan Pascabencana
- (4) Tersusunnya Indeks Pemulihan Bencana Indonesia
- (5) Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana

b. Analisis Lingkungan Strategis

1) Kondisi Internal

(a) Kelemahan/Keterbatasan

- (1) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
- (2) Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
- (3) Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
- (4) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- (5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- (6) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- (7) Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
- (8) Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia;
- (9) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (10) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- (11) Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;

(b) Kekuatan

- (1) Tersedianya peraturan perundang-undangan PB;

- (2) Eksistensi kelembagaan BNPB yang setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
- (3) Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam;
- (4) Terbentuknya Tim Reaksi Cepat BNPB, 33 provinsi dan 127 kabupaten/kota dan telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sejak tahun 2010;
- (5) Terlaksananya inisiasi kerjasama dengan BNSP dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB);
- (6) Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- (7) Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (8) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terus meningkat;
- (9) Tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- (10) Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
- (11) BNPB telah memiliki Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- (12) BNPB telah memiliki Indeks Rawan Bencana Indonesia;
- (13) BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- (14) BNPB sudah memiliki Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi;
- (15) BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- (16) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;

- (17) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM (selama kurun waktu 2009-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang);
 - (18) Pengalaman penanganan bencana diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;
 - (19) Tersedianya perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi PB.
 - (20) Terbangunnya Pusdalops PB di Pusat dan daerah;
 - (21) Selama 2008-2014, BNPB telah menyediakan dan mendistribusikan logistik dan peralatan sebagai stok persediaan (buffer stock) bagi BPBD di 33 provinsi dan 427 BPBD kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - (22) Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - (23) BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB);
 - (24) BNPB telah memiliki Program Desa Tangguh Bencana.
- 2) Kondisi Eksternal
- a) Peluang
 - (1) Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 - (2) Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - (3) Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;
 - (4) Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
 - (5) Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - (6) Terbangunnya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk

mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;

- (7) Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
- (8) Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- (9) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- (10) Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- (11) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- (12) Adanya peran serta masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.

b) Tantangan

- (1) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam.
- (2) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
- (3) Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana.
- (4) Banyak daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- (5) Penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- (6) Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (7) Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;

- (8) Implementasi komitmen program, kegiatan dan anggaran penanggulangan bencana pada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
- (9) Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
- (10) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- (11) Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- (12) Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- (13) Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebaran luasan data dan informasi Pusat – daerah.

c. Isu strategi 2015- 2019

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - b) Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c) Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - d) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
 - e) Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan,

mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan. serta pembentukan desa tangguh bencana;

- f) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat. serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- g) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- h) Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data. Informasi dan Humas;
- i) Masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang belum selesai sesuai target yang ditetapkan. dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya;
- j) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

2) Bidang Penanganan Darurat

- a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat. efektif dan efisien;
- b) Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan public, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurat;

- c) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
 - d) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
 - e) Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak – pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
 - f) Belum optimalnya pengalokasian anggaran dana siap pakai (*on call*) sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing – masing sub bidang yang berada dibawah bidang penanganan darurat.
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang – sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan. serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - c) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar kementerian/lembaga. Pusat dan daerah;
 - d) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana.
- 4) Bidang Logistik dan Peralatan
- a) Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
 - b) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan. maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan

pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;

- c) Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan. distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
 - d) Membangun database dan sistem informasi kinerja logistik dan peralatan berkoordinasi dengan Pusat Data. Informasi dan Humas.
- 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
- a) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program melalui koordinasi antara dukungan manajemen dengan bidang, antar bidang, sub bidang, serta antara Pusat dan daerah;
 - b) Peningkatan koordinasi dan pengelolaan program. kegiatan dan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN);
 - c) Diperlukan adanya kajian, reviu, dan pemutakhiran peraturan dan perundangan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d) Masih banyaknya peraturan perundang – undangan yang belum disosialisasikan sampai ditingkat kabupaten/kota;
 - e) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga baik antar kementerian/lembaga. Pusat – daerah. maupun dengan lembaga – lembaga non-pemerintah;
 - f) Peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan. akuntabel dan tepat waktu;
 - g) Peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian yang berkualitas. peningkatan produktivitas pegawai;
 - h) Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset penanggulangan bencana.
- 6) Pengawasan
- a) Peningkatan pengendalian dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dana siap pakai (on call) dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - c) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e) Belum optimalnya sistem pengendalian internal.
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- a) Penataan program, kurikulum dan jadwal pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
 - b) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) berkoordinasi dengan sub bagian kepegawaian pada Biro Umum, termasuk membuka hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri;
 - c) Mengidentifikasi pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan dan inovasi penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui kerjasama dengan berbagai kelembagaan;
 - d) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
- 8) Data, Informasi, dan Humas
- a) Pengintegrasian data dan informasi seluruh unit kerja di lingkungan BNPB;
 - b) Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan terintegrasi;
 - c) Peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan;
 - d) Pengembangan TIK dan Pusdalops di daerah risiko bencana tinggi;
 - e) Peningkatan kualitas kehumasan, penerangan, dan dokumentasi kebencanaan.

d. Visi. Misi BNPB 2015-2019

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, maka visi BNPB 2015-2019 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, Memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:

- 1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
- 2) Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat. efektif dan efisien;
- 3) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;

- 4) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- 5) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

TUJUAN

Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan, adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- 2) Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
- 3) Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 4) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
- 5) Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah **menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi**, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Tabel 2
Tujuan Dan Sasaran Program BNPB

No	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1	2	3	4
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana. yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat	meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1) Persentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana; 2) Persentase meningkatnya kapasitas masyarkat dalam PB; 3) Persentase menigkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah
2	Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana	1) Rata-rata waktu respon kejadian bencana; 2) Persentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masy korban bencana; 3) Persentase jumlah korban yang selamat akibat bencana; 4) Jumlah personil PB yang terlatih dan kompeten
		Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana	1) Persentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi; 2) Persentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi; 3) Persentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi; 4) Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana; 5) Persentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.
		Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan	Persentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana
3	Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan	1) Persentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memenuhi kriteria;

No	Tujuan	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1	2	3	4
	pascabencana	rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	2) Persentase pelaksanaan rehab rekons pasca bencana bidang fisik; 3) Persentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pascabencana
4	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB	Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan PB yang memadai untuk kesiapsiagaan	Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan
		Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan PB	Persentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.
5	Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, Penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN). dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia	1) Persentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu; 2) Persentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana; 3) Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga; 4) Persentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu; 5) Rata - rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian; 6) Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.
6	Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif. efisien. transparan dan akuntabel	terwujudnya akuntabilitas dan good governance	1) Tingkat penerapan pengendalian internal; 2) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti; 3) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan

3. Renstra BPBD Kabupaten/Kota

Pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah memperoleh apresiasi yang cukup tinggi. Sampai akhir Desember 2017, dari 35 kabupaten/Kota telah terbentuk 33 BPBD mendasarkan

Peraturan Daerah. 1 BPBD terbentuk melalui Peraturan Walikota (Kota Magelang) dan 1 Belum membentuk BPBD (Kota Salatiga).

D. Telaahan RTRW dan KLHS

1. RTRW

Dalam dokumen RTRW Prov Jawa Tengah tahun 2009 – 2029 kawasan rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 6 tahun 2010 pasal 30). Pengaturan rencana pola tata ruang Provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan dibawahnya termasuk diantaranya membahas tentang kawasan rawan bencana alam. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.

Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Jawa Tengah dalam kajian RTRW Provinsi meliputi 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. yaitu:

a) Banjir;

Tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Luas daerah rawan banjir di Jawa Tengah adalah 199.427 Ha, meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Blora, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal,

b) Tanah Longsor;

Kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan, Wialyah terancama meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati,

Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang,

c) Letusan Gunung Berapi;

Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang berpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang berbeda dan kawasan yang berupa lembah yang menjadi daerah aliran lahar dan lava, Daerah terancam lerusan Gunung Merapi terdiri dari Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang sedangkan Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Tegal,

d) Gempa Bumi;

Kawasan yang pernah mengalami gempabumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI) dan kemungkinan dapat mengalami bencana gempa bumi dengan tingkatan daerah terlarang, daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman,

e) Gelombang Pasang;

Kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gelombang pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal,

f) Tsunami;

Kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami,

g) Kekeringan;

Ancaman pada musim kemarau tersebut yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes, Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah terjadi kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk,

a) Kawasan kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung kontrol point, dengan ketentuan :

- (1) Faktor $K > 0,7$ (aman) meliputi Pemalang, Kendal, Temanggung, Magelang;
 - (2) Faktor $K = 0,5$ s/d $0,7$ (potensi kekeringan) meliputi Brebes, Batang, Kota Semarang, Semarang, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga;
 - (3) Faktor $K = 0,3$ s/d $0,5$ (rawan kekeringan) meliputi Tegal, Pekalongan, Jepara, Blora, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Kebumen, Banyumas;
 - (4) Faktor $K < 0,3$ (sangat rawan kekeringan) meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Cilacap,
- b) Kawasan kekeringan dari aspek air bersih ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, mahal biaya memperoleh air bersih,
- h) Abrasi;
- Kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi, Proses abrasi berdampak sebagai proses pengikisan tanah di daratan kawasan pesisir pantai utara, Hal ini berdampak pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal.
- i) Angin Topan
- Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami angin topan, dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan.
- j) Gas Beracun,
- Kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi yang membahayakan akibat vulkanisme, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila, Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng, mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo,

Selain mendeskripsikan pengelolaan kawasan rawan bencana, kajian bencana juga dapat menjadikan salah satu penyebab untuk ditinjaunya kembali dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah, Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana

alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi Jawa Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun,

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tujuannya adalah memberikan masukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 Km dan dari utara ke selatan 226 Km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 791,76 Km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 Km dan pantai selatan sepanjang 289,07 Km. Secara umum kondisi suhu udara berkisar antara 24,4° C dan 28,5° C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 % - 86 %.

Topografi wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi sekitar 53% wilayah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki relief yang beraneka ragam. Ada daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah. Ada daerah dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah, ada juga daerah pantai yaitu Pantai Utara dan Selatan. Menurut ketinggian, wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- a. Ketinggian antara 0 - 100 m, seluas 44,90%
- b. Ketinggian antara 100 - 500 m, seluas 36,10%

- c. Ketinggian antara 500 – 1000 m, seluas 13,40%
- d. Ketinggian antara > 1000 m, seluas 5,51%

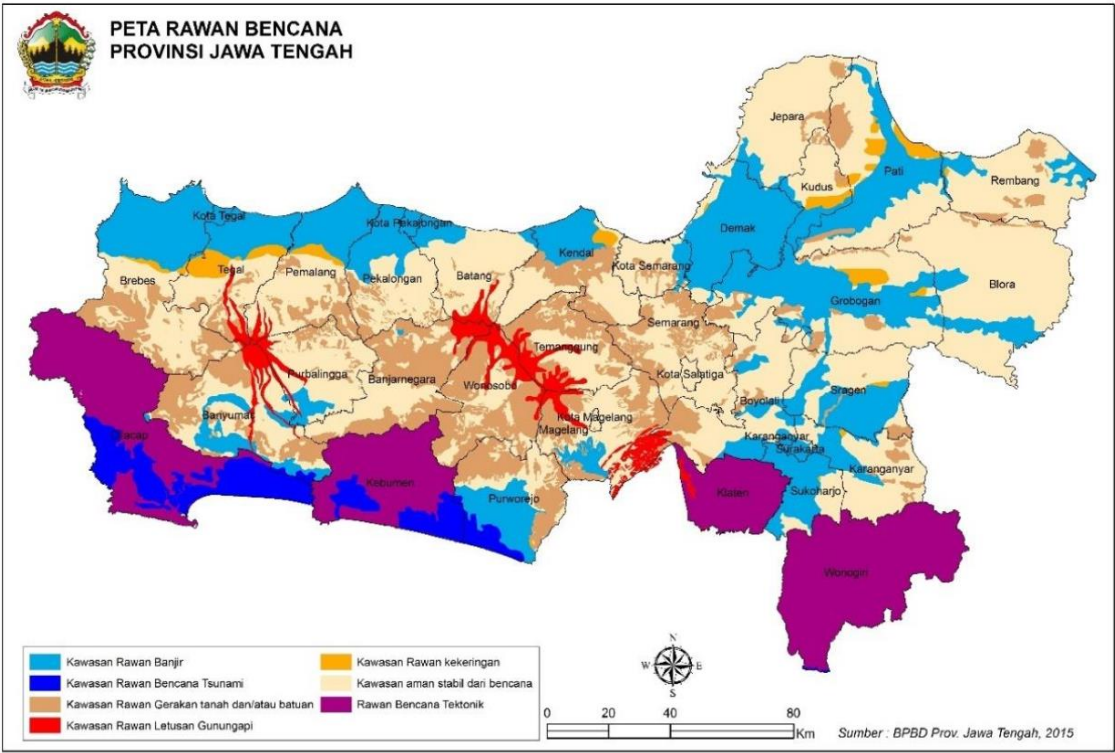
Daerah pantai utara Jawa Tengah merupakan dataran rendah yang sempit. Di kawasan Brebes terdapat dataran selebar 40 Km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 Km. Dataran ini bersambung dengan depresi Randublatung di timur. Gunung Muria pada Jaman Holosen merupakan pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan aluvial dari muara sungai-sungai yang mengalir. Di selatan daerah tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30-50 Km; di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Prahu dan Gunung Ungaran.

Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat Gunung Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Temanggung dan Magelang) merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Pegunungan Serayu Selatan merupakan pengangkatan zona Depresi Bandung. Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10-25 Km. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.

Risiko lingkungan hidup terkait dengan tugas dan pokok fungsi BPBD Prov Jawa Tengah adalah pada aspek risiko bencana. Kondisi dan karakteristik wilayah Jawa Tengah cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologi maupun meteorologis mempunyai potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam, maupun bencana sosial, seperti

ancaman bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 22 kabupaten/kota termasuk risiko tinggi, dan 13 kabupaten/kota lainnya termasuk risiko sedang. Kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yaitu Kabupaten Cilacap, Purworejo, Tegal, Brebes, Banyumas, Pemalang, Kebumen, Demak, Kota Semarang, Pekalongan, Pati, Rembang, Batang, Kendal, Jepara, Grobogan, Purbalingga, Boyolali, Banjarnegara, Blora, Kota Pekalongan, dan Wonogiri. Sementara 13 kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana sedang meliputi Kabupaten Magelang, Semarang, Temanggung, Sragen, Wonosobo, Kudus, Karanganyar, Klaten, Kota Tegal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta.

Daerah yang berkaitan dengan kerawanan bencana di wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagi dalam Kawasan aman stabil dari bencana, Kawasan Rawan kekeringan, Kawasan Rawan Gerakan tanah dan/atau batuan, banjir, Kawasan Rawan letusan Gunungapi, Kawasan Rawan Gempa tektonik dan Tsunami. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah rawan terhadap berbagai jenis bencana yaitu sebesar 63,02% dari luas wilayah. Sedangkan, wilayah yang aman dan stabil dari bencana di Jawa Tengah seluas 36,98%.



Gambar 1 Peta Rawan Bencana Jateng (BPBD Prov Jateng, 2015)

Tabel 3
Luas Kawasan Rawan Bencana Jateng

No	Kawasan Bencana	Luas (Ha)	% Luas
1	2	3	4
1	Kawasan aman stabil dari bencana	1.203.615,69	36,98
2	Kawasan Rawan Banjir	680.488,57	20,91
3	Kawasan Rawan Bencana Tsunami	90.342,29	2,78
4	Kawasan Rawan Gerakan tanah dan/atau batuan	479.046,55	14,72
5	Kawasan Rawan kekeringan	270.732,16	8,32
6	Kawasan Rawan Letusan Gunungapi	69.201,18	2,13
7	Rawan Bencana Tektonik	460.985,57	14,16
	Total	3.252.412,00	100,00

Sumber : LHK 2017

Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kajian iklim oleh BAPPENAS pada 2012 memprakirakan bahwa pada masa yang akan datang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap bencana banjir selama musim penghujan semakin bertambah selain faktor tingginya curah hujan juga dipengaruhi oleh faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi situasi curah hujan tinggi. Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang jauh dari akses air, akan mengalami ancaman kekeringan. Selain aspek curah hujan dan kemarau, kenaikan suhu akan terus terjadi. Secara global kenaikan suhu ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. Suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 11 kabupaten kota berada dalam kategori cukup rentan (skor indeks 3), 18 kabupaten kota dalam kategori agak rentan (skor indeks 2) dan 6 kabupaten kota berada pada kategori tidak rentan (skor indeks 1). Sesuai kondisi geografisnya maka ancaman pada wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan potensi meningkatnya genangan dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadinya peningkatan banjir dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor akan meningkat ancaman bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan

ancaman nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir terhadap terjangan gelombang laut.



Gambar 2 Indeks Kerentanan Iklim (sumber: KLHK 2015)

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Prov Jateng

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kesepakatan global tersebut dilaksanakan dalam pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals (MDGs)*, SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa

menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut diwujudkan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tonggak utama yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. SDGs/TPB terdapat 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu:

- a. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
- b. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- c. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera
Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- d. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
- e. Tujuan 5 - Kesenjangan gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- f. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- g. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- h. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

- j. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- k. Tujuan 11 - Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- l. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- m. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Tujuan 14 - Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- o. Tujuan 15 - Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- p. Tujuan 16 - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- q. Tujuan 17 - Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian indikator TPB terbagi dalam indikator nasional dan provinsi. Terdapat 209 indikator TPB yang menjadi kewenangan provinsi dan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 191

indikator, dimana 105 indikator telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 15 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 44 indikator yang belum dilaksanakan dan 27 indikator belum ada datanya.

Pengategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di provinsi Jawa tengah pada periode RPJMD berikutnya yaitu 2018 – 2023. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak ada datanya.

Capaian indikator TPB Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional diperoleh masing-masing capaian sebagai berikut.

a. Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 105 indikator atau 55% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh yaitu sebanyak 17 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 16 indikator, tujuan 1 tanpa kemiskinan 13 indikator dan tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak sebanyak 13 indikator.

b. Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 15 indikator atau 8% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Indikator paling banyak dalam kategori ini adalah oleh tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dan tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera dengan indikator masing-masing sejumlah 4 indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target.

c. Target TPB yang memiliki data tetapi belum menjadi target (TT)

Indikator ini selama ini telah memiliki data pada masing-masing OPD yang mengampu kegiatan terkait, tetapi dengan berbagai

pertimbangan belum menjadi indikator dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 27 indikator atau 14% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Indikator paling banyak dalam kategori ini adalah oleh tujuan 8 yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak sebanyak 6 indikator. Selanjutnya indicator terbanyak berikut adalah indikator tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak sebanyak 4 indikator yang memiliki data tetapi belum menjadi target di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

d. Target TPB yang belum ada data (NA)

Indikator ini tidak ada data yang dapat mendukung penjelasan capaiannya. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 44 indikator atau 23% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan provinsi. Indikator paling banyak kategori ini adalah oleh tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh sebanyak 8 indikator. Selanjutnya indikator terbanyak berikut adalah indicator tujuan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan sebanyak 6 indikator, tujuan 8 pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak sebanyak 5 indikator dan tujuan 9 infrastruktur, industri dan inovasi sebanyak 5 indikator.

Tabel 4
Tujuan dan Status Capaian Indikator

No	TPB	Jumlah Indikator	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanpa Kemiskinan	19	13	4	1	1
2	Tanpa Kelaparan	8	7	0	0	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	25	16	4	2	3
4	Pendidikan Berkualitas	13	10	0	2	1
5	Kesetaraan Gender	10	6	1	2	1
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17	13	0	4	0
7	Menjamin Akses Energi	5	2	0	0	3
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	14	3	0	6	5
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	8	1	1	1	5
10	Mengurangi Kesenjangan	8	3	1	1	3
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	12	7	0	1	4
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	4	0	0	0
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	1	0	2	0
14	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim	3	0	1	0	2
SS : Dilaksanakan Mencapai Target SB: Dilaksanakan Belum Target			TT: Ada Data Tidak Ada Target N/A: Tidak Ada Data			

BPBD Prov Jawa Tengah sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa indikator yang harus terpenuhi, yaitu terkait dengan pilar social dan pilar lingkungan.

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 75 indikator.

Tabel 5
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi LH
1	2	3
Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk kemiskinan	- Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan baik secara total maupun menurut jenis kelamin dan kelompok umur - Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan - Penanganan kawasan permukiman kumuh - Kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 11 kabupaten kota yang berada pada kategori cukup rentan.
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	- Penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/kapita/hari - Kualitas konsumsi pangan (skor pola pangan harapan) dan tingkat konsumsi ikan yang masih rendah	Penurunan lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	- Deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B - Obesitas pada Penduduk Usia 18+ - Akses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang merugikan - Penggunaan alat kontrasepsi dan kepesertaan KB aktif sebagai kontrol pertumbuhan penduduk - Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (Jumlah yang menerima Jamkesda) - Penduduk umur ≥15 tahun yang merokok	
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	- Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk seluruh tingkat pendidikan termasuk pra sekolah dasar dan perguruan tinggi - Angka melek huruf	

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi LH
1	2	3
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	- Kebutuhan keluarga berencana /KB yang belum terpenuhi - Angka partisipasi kasar untuk seluruh tingkat pendidikan - Tenaga manajer, profesional, administrasi & teknisi perempuan - Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dan Unmeet need KB	

Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6
Capaian Indikator Pilar Sosial Perangkat Daerah

No	Dinas	Jumlah	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	BPJS	1	0	1	0	0
2	BPBD	3	1	0	1	1
3	BPS	8	0	1	3	4
4	DINKES	21	18	0	1	2
5	DINSOS	2	2	0	0	0
6	BNN JATENG	5	3	1	1	0
7	DPPA DALDUKKB	10	5	4	1	0
8	DISDIKBUD	14	14	0	0	0
9	BKKBN	4	0	4	0	0
10	DISHANPAN	3	3	0	0	0
11	DPU BINMAR CIPKA	2	2	0	0	0
12	DISPERAKIM	1	1	0	0	0
13	DINAS ESDM	1	1	0	0	0
		75	50	11	7	7

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 44 indikator. Rumusan tujuan pada isu strategis TPB pilar lingkungan yang terkait dengan bencana, adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi Lingkungan Hidup
1	2	3
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Cakupan akses sanitasi layak, dengan meningkatkan desa /kelurahan Sanitasi Total - Berbasis Masyarakat (STBM) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) - Pengelolaan dan penyehatan DAS yang dapat meningkatkan jumlah mata air melalui konservasi sumber daya air	-Daya dukung air permukaan yang terlampaui -Jasa Ekosistem Penyedia air dalam kategori rendah (9.95%) -Jasa ekosistem pengatur iklim dalam kategori sedang (42.12%)
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Layanan penanganan sampah perkotaan - Kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil - Indeks Risiko Bencana (IRB) - Penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana tingkat daerah	-Layanan pengangkutan sampah keseluruhan kurang dari 30% dan khusus kawasan perkotaan berkisar 70-90% -38% TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, hanya 22% yang menggunakan sistem controlled landfill, sisanya masih open dumping -Jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah dalam kategori sedang (38,90%)
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Daur ulang sampah dan pengelolaan limbah B3	-38% TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, hanya 22% yang menggunakan sistem <i>controlled landfill</i>, -sisanya masih open dumping - Jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah dalam kategori sedang (38,90%)
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya	- Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam melalui Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah akibat dampak perubahaniklim - Mengurangi korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana iklim	-Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada 11 kabupaten kota yang berada pada kategori cukup rentan. -63% kawasan rawan bencana dengan jenis bencana beragam
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	- Melestarikan kawasan konservasi laut dan memberikan perlindungan terhadap nelayan - Kepatuhan pelaku usaha dalam penangkapan ikan	Belum tercapainya luasan ideal kawasan hutan bakau dan kawasan sempadan pantai
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan kawasan konservasi	- Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan - Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem - Pemulihan dan rehabilitasi kawasan konservasi	Belum tercapainya luasan ideal kawasan lindung untuk mata air, danau, sungai dan lindung bawahnya serta peningkatan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi Lingkungan Hidup
1	2	3
ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi pengurusan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	terdegradasi dan lahan kritis	kawasan perlindungan plasma nutfah

Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8
Capaian Indikator Pilar Lingkungan Perangkat Daerah

No	Dinas	Jumlah	SS	SB	TT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	DLHK	18	15	1	1	1
2	DISHUB	1	1	0	0	0
3	PUSDATARU	2	2	0	0	0
4	DINKES	2	0	0	2	0
5	DKP	3	0	1	0	2
6	BMCK	5	4	0	1	0
7	DINPORAPAR	1	0	0	0	1
8	BPBD	8	2	0	3	3
9	DISPERAKIM	1	1	0	0	0
10	ESDM	1	1	0	0	0
11	PERHUTANI	1	0	0	1	0
12	BMKG	1	1	0	0	0
		44	27	2	8	7

Tabel 9
Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023

Awal	No. Target	Target	Indikator	Sumber data	Capaian			Target TPB		Rate		Target 2023
					Satuan	2015	2017	Target	2030	Ex Bau	TPB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PILAR LINGKUNGAN												
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
TT	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD	Indeks	-	-	Turun	30%			
TT	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	%	-	11,00	Naik	100,00	5,50	6,85	52,08
TT	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	BPBD	Dokumen	0	4	Naik	35	2	2	18
PILAR SOSIAL												
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN												
TT	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	BPBD	Dokumen	0	1	Ada	1	-	-	1

Tabel 10
Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan upaya tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung

No	TARGET TPB	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2023	INSTANSI
1	2	3	4	5
PILAR LINGKUNGAN				
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.5 .1(a)	Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin, dan orang-orang dalam situasi rentan	- Belum terpetakannya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai indikator tingkat risiko bencana pada masing-masing Kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Perlunya penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk masing-masing kabupaten Kota di Jawa Tengah sebagai Baseline indicator dalam pengelolaan Risiko bencana Yang di update setiap tahun - Menurunkan indeks risiko bencana sebanyak 30% dari baseline IRB kabupaten kota di Jawa Tengah Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengah melalui peningkatan tutupan hutan	BPBD
11.b .1*	Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	- Masih sedikitnya kabupaten kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana yaitu 4 kabupaten kota atau 11 % dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Memfasilitasi penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana di Kabupaten kota terutama yang memiliki Indeks Rawan Bencana Tinggi minimal sampai dengan 18 kabupaten kota atau 52% dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah - Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengah melalui peningkatan tutupan hutan	BPBD DLHK DISPERKI M DKP

No	TARGET TPB	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2023	INSTANSI
1	2	3	4	5
	PILAR SOSIAL	-	-	
1.5.3*	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	- Masih sedikitnya kabupaten kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana yaitu 4 kabupaten kota atau 11 % dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Memfasilitasi penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana di Kabupaten kota terutama yang memiliki Indeks Rawan Bencana Tinggi minimal sampai dengan 18 kabupaten kota atau 52% dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah - Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengahmelalui peningkatan tutupan hutan	BPBD

Tabel 11
Indikator SDGs dalam Renstra

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	SKPD
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN				
1.5.1 (e)		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD
1.5.3*		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	BPBD
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.5.1.(b)(*)		Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	BPBD
11.5.1.(c)		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Jawa Tengah menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perlu antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana, Letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:

1. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
2. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
3. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
4. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
5. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

Bencana alam terus terjadi di Jawa Tengah akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak
2. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
3. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian

4. Munculnya berbagai penyakit
5. Korban jiwa, cedera, cacat
6. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana

Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun social, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut
2. Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
3. Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana
4. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai
 - a. alat system peringatan dini (EWS)
 - b. rambu petunjuk jalur evakuasi
5. Masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD berdasarkan Perda, sehingga menghambat fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota tersebut;
6. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota
7. Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung PB
8. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah
9. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
10. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah

11. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jateng
12. peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana
13. masih perlunya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Sejalan dengan visi Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023, **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”** dengan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang regius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

BPBD Prov Jawa Tengah menetapkan tujuan perangkat daerah adalah **Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.** Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang akan dicapai disajikan dalam table berikut,

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Prov Jateng

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah dalam PB	Angka	3,50	3,50	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,60
	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas wilayah PB didaerah rawan bencana	%	0	0	8	9	10	11	12	50
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	0	0	4	5	6	7	8	30
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	0	0	70	75	80	85	90	90
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	Angka	0	0	70	75	80	85	90	90
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Angka	64,66	64,66	65,01	66,01	67,01	68,01	70,01	70,01

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

1. Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Jawa Tengah
2. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan bencana
3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
4. Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat
5. Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Jawa Tengah
6. Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam penanganan bencana
7. Menyelenggarakan simulasi , latihan gabungan antar pemangku kepentingan
8. Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan
9. Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana
10. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana
11. Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana
12. Menyediakan informasi jenis-jenis kebutuhan masyarakat terdampak bencana
13. Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana
14. Menyediakan jenis-jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana
15. Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Jateng secara kewilayahan dalam upaya mendekatkan dengan potensi bencana
16. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBD
17. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil

Kebijakan

1. Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana
2. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah
3. Memfungsikan BPBD untuk melaksanakan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana
4. Menjadikan BPBD Provinsi Jateng sebagai *incident commander* dalam tanggap darurat bencana
5. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
6. Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di kabupaten /kota risiko bencana
7. Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana
8. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana
9. Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi
10. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana
11. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana
12. Pengadaan sarana dan prasarana PB
13. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar
14. Meningkatkan kemampuan aparatur PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
15. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
16. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas
17. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah
18. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
19. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik
20. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu

Tabel 1
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi dan Kebijakan BPBD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Jawa Tengah	1. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana
		Memberdayakan masyarakat di daerah rawan bencana	2. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana
		Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	3. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah
		Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat	4. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Jateng	5. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jateng
		Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam PB	1. Menjadikan BPBD Provinsi Jateng sebagai <i>incident commander</i> dalam tanggap darurat bencana
		Menyelenggarakan simulasi, latihan gabungan antar pemangku kepentingan	2. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemantauan bencana
		Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan	3. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana	1. Meningkatkan kemampuan aparat PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
		Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana	2. Meningkatkan pemulihan social ekonomi masyarakat pasca bencana
		Melakukan pelatihan, bintek peningkatan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
		kapasitas pemangku kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana	3. Sinergi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antar sector terdampak
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Menyediakan informasi jenis-jenis kebutuhan masyarakat terdampak bencana	1. Pengadaan sarana dan prasarana PB
		Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana	2. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar
		Menyediakan jenis-jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana	3. Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di kabupaten /kota risiko bencana
		Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Jateng secara kewilayahan dalam upaya mendekatkan dengan potensi bencana	4. Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBD	1. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu 2. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana 4. Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil	1. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah 2. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik 3. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah 4. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan merupakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Prov Jawa Tengah sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana Jawa Tengah.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Prov Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Prov Jawa Tengah sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan BPBD Jawa Tengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1		2	3	4	5	6	
Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jateng dalam penanggulangan bencana	Indeks ketahanan daerah dalam PB	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah Rawan bencana	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah Rawan bencana	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Jumlah Desa tangguh bencana terbentuk
						Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	persentase upaya PRB Jateng
						Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang
						Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/prabencana	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih
		Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan darurat kebencanaan	Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda	Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih
						Pengembangan Pusdalops Jateng	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani
						Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan
						Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih
		Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana	persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase rehab rekon pasca bencana	Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	persentase masyarakat terdampak yang direhab
						Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan logistik bencana	dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana
						Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana Jateng	persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana
						Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	- Jumlah penyediaan logistik - persentase dapur umum yang dilaksanakan
						Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	- Jumlah penyediaan peralatan bencana - persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan PD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD
						Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan PD
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik PD
						Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
						Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran PD
						Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar	Jumlah bulan terpenuhinya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
						Daerah Perangkat Daerah	pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
						Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat PD
						Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan PD
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional PD
						Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga PD
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan
						Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/Bintek/Seminar
						Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik PD
						Pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian PD
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
							Operasional Sekertariat DPRD
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
					Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD

Rincian program dan kegiatan, sesuai dengan target indikator kinerja program dan kegiatan maupun besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2
Program/Kegiatan serta Pagu Pendanaan Indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan ketangguhan masyarakat jateng dalam penanggulangan bencana				Indeks Ketahanan Daerah dalam PB	Angka	3,50	3,50	3,52	0	3,54	0	3,56	0	3,58	0	3,60	0	3,60	0		
	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan			Persentase penambahan kapasitas wilayah di daerah rawan Bencana	%	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	50	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	han, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana																				
		1.05.19	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						16.650.000		15.680.000		16.115.000		18.670.000		19.570.000		86.685.000	Set BPBD	
				Persentase penurunan risiko bencana	%	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0		
		1.06.19.001	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana						2.000.000		2.100.000		215		2.200.000		2.350.000		8.865.000	Bid. P dan K	35 Kab/Kota;
				Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	Desa	8	68	18	2.000.000	19	2.100.000	20	215	21	2.200.000	22	2.350.000	100	8.865.000		
		1.06.19.002	Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana						1.800.000		1.850.000		1.900.000		1.950.000		2.000.000		9.500.000	Bid. P dan K	15 kab/kota
				persentase upaya PRB Jateng	%	0	0	10	1.800.000	15	1.850.000	20	1.900.000	25	1.950.000	30	2.000.000	30	9.500.000		
		1.06.19.003	Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg						1.800.000		1.800.000		1.900.000		2.000.000		2.200.000		9.700.000	Bid. P dan K	10 kab/kota
				Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	Unit	95	158	225	1.800.000	230	1.800.000	230	1.900.000	230	2.000.000	240	2.200.000	960	9.700.000		
		1.06.19.004	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana						1.800.000		1.900.000		2.000.000		2.100.000		2.200.000		10.000.000	Bid. P dan K	35 Kab/Kota;
				jumlah masyarakat siaga bencana yang	Orang	500	500	1	1.800.000	1.05	1.900.000	1.1	2.000.000	1.15	2.100.000	1.2	2.200.000	5.5	10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
								T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				terlatih																	
	Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana			Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	25	0		
		1.05.19	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						16.650.000		15.680.000		16.115.000		18.670.000		19.570.000		86.685.000	Set BPBD	
				Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		1.06.19.005	Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda						800		900		1.000.000		1.100.000		1.150.000		4.950.000	Bidang Penanganan Darurat	35 kab.kota
				Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih	Angkatan	3	3	7	800	7	900	7	1.000.000	8	1.100.000	8	1.150.000	37	4.950.000		
		1.06.19.006	Pengembangan Pusdalops Jateng						600		620		650		680		700		3.250.000	Bid Penanganan Darurat	35 kab/kota tdampak
				Persentase masyarakat	%	0	0	10	600	20	620	30	650	40	680	40	700	100	3.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				terdampak yang tertangani																	
		1.06.19.007	Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana						1.100.000		1.150.000		1.200.000		1.225.000		1.250.000		5.925.000	Bidang Penanganan Darurat	35 kab/kota
				jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia /disiapkan	Kegiatan	0	0	2	1.100.000	3	1.150.000	4	1.200.000	5	1.225.000	5	1.250.000	24	5.925.000		
		1.06.19.008	Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng						500		550		600		650		700		3.000.000	Bidang Penanganan Darurat	10 kabupaten/kota
				jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	Kelompok	0	0	3	500	5	550	5	600	6	650	7	700	26	3.000.000		
	Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana			persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		1.05.19	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						16.650.000		15.680.000		16.115.000		18.670.000		19.570.000		86.685.000	Set BPBD	
				Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		1.06.19.009	Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng						750		800		850		900		1.000.000		4.300.000	Bid. Rehab dan Rekon	5 kab/kota terdampak
				persentase masyarakat terdampak yang	%	0	0	20	750	30	800	20	850	30	900	40	1.000.000	90	4.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				direhab																	
		1.06.19.010	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng						350		370		400		425		450		1.995.000	Bid. Rehab dan Rekon	3 kabupaten/kota
				Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	Orang	50	60	100	350	100	370	100	400	100	425	100	450	500	1.995.000		
		1.06.19.011	Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng						350		400		450		470		470		2.140.000	Bid. Rehab dan Rekon	35 lokasi terdampak
				persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	%	0	0	10	350	20	400	20	450	30	470	40	470	90	2.140.000		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana			Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		1.05.19	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						16.650.000		15.680.000		16.115.000		18.670.000		19.570.000		86.685.000	Set BPBD	
				Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		1.06.19.012	Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana						2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		13.500.000	Bidang Logistik dan Peralatan	35 kab/kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah penyediaan logistik (bulan)	Jenis	10	10	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	50	12.500.000		
				persentase dapur umum yang dilaksanakan	%	100	100	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	1.000.000		
		1.06.19.013	Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng						2.100.000		540		2.250.000		2.270.000		2.400.000		9.560.000	Bid Logistik dan Peralatan	35 kab kota
				Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	Unit	10	10	10	1.800.000	10	190	10	1.900.000	10	1.900.000	10	2.000.000	50	7.790.000		
				persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	%	100	100	100	300	100	350	100	350	100	370	100	400	100	1.770.000		
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah				Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	0	0	75	0	78	0	80	0	85	0	85	0	85	0		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai kepuasan masyarakat	Angka	0	0	70	0	75	0	80	0	85	0	90	0	90	0		
		1.05.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						9.500.000		9.461.000		10.424.000		10.710.000		11.010.000		51.105.000	Set BPBD	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		1.05.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah						1.500.000		1.500.000		1.550.000		1.550.000		1.600.000		7.700.000	Bagian Tata Usaha	BPBD Prov Jateng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Bulan	0	0	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.550.000	12	1.550.000	12	1.600.000	60	7.700.000		
		1.05.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						300		300		310		310		330		1.550.000	Bagian Tata Usaha	BPBD Prov Jateng
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan PD	Bulan	12	12	12	300	12	300	12	310	12	310	12	330	50	1.550.000		
		1.05.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						580		58		585		590		600		2.413.000	Bagian Tata Usaha	BPBD Prov Jateng
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik PD	Bulan	12	12	12	580	12	58	12	585	12	590	12	600	60	2.413.000		
		1.05.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah						250		250		300		300		300		1.400.000	Bagian Tata Usaha	BPBD Prov Jateng
				Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	250	12	250	12	300	12	300	12	300	60	1.400.000		
		1.05.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran PD						535		535		535		545		550		2.700.000	Bagian Tata Usaha	BPBD Prov Jateng
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran PD	Bulan	12	12	12	535	12	535	12	535	12	545	12	550	60	2.700.000		
		1.05.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah PD						1.500.000		1.550.000		1.600.000		1.650.000		1.700.000		8.000.000	Bagian Tata Usaha	35 kab /kota, K / L
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi	Bulan	12	12	12	1.500.000	12	1.550.000	12	1.600.000	12	1.650.000	12	1.700.000	60	8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				dan konsultasi ke dalam dan luar daerah																	
		1.05.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						200		200		230		230		250		1.110.000	Bagian Tata Usaha	BPBD Prov Jateng
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat PD	Bulan	12	12	12	200	12	200	12	230	12	230	12	250	60	1.110.000		
		1.05.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						30		30		30		30		30		150	Bagian Tata Usaha	BPBD Prov Jateng
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan PD	Bulan	12	12	12	30	12	30	12	30	12	30	12	30	60	150		
		1.05.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah						650		670		690		720		750		3.480.000	Bagian Tata Usaha	Bpbd prov jateng
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan /Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas /Operasional PD	Bulan	12	12	12	650	12	670	12	690	12	720	12	750	60	3.480.000		
		1.05.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga PD						500		520		550		575		600		2.745.000	Bagian Tata Usaha	Bpd prov jawa tengah
				Jumlah bulan tercukupinya	Bulan	12	12	12	500	12	520	12	550	12	575	12	600	60	2.745.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023					
								T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga PD																	
		1.05.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor						750		770		800		800		800		3.920.000	Bagian Tata Usaha	BPBD Prov Jateng
				Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD	Jenis	8	9	10	750	10	770	10	800	10	800	10	800	50	3.920.000		
		1.05.01.013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						1.003.000		1.300.000		1.400.000		1.500.000		1.500.000		6.703.000	Bagian Tata Usaha	Bpbd prov jateng
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	1	4	2	1.003.000	2	1.300.000	2	1.400.000	2	1.500.000	2	1.500.000	10	6.703.000		
		1.05.01.014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas						32		33		34		35		35		169	Bagian Tata Usaha	Bpbd prov jateng
				Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Unit	60	60	60	32	60	33	60	34	60	35	60	35	300	169		
		1.05.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						100		110		115		120		125		570	Bagian Tata Usaha	Bpbd prov jateng
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/Bintek/ Seminar	Orang	25	25	25	100	25	110	25	115	25	120	25	125	125	570		
		1.05.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah						750		775		800		825		850		4.000.000	Bagian Tata Usaha	Kota semarang
				Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	2	2	2	750	2	775	2	800	2	825	2	850	10	4.000.000		
		1.05.01.023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah						100		110		120		130		140		600	Bagian Tata Usaha	Kota semarang
				Jumlah bulan	Bulan	0	0	12	100	12	110	12	120	12	130	12	140	60	600		Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada Thn Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah																	semarang
		1.05.01.025	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional						720		750		775		800		850		3.895.000	Bagian Tata Usaha	Kota semarang
				Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD	Bulan	12	12	12	720	12	750	12	775	12	800	12	850	60	3.895.000		Kota semarang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD			Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Angka	64,66	64,66	65	0	66	0	67	0	68	0	70	0	70	0		
		1.05.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						800		800		840		850		950		4.240.000	Set BPBD	Kota Semarang
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
		1.05.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD						500		500		520		550		600		2.670.000	Bagian Tata Usaha	Bpbd prov. Jateng
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	5	500	5	500	5	520	5	550	5	600	25	2.670.000		
		1.05.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300		300		320		300		350		1.570.000	Bagian Tata Usaha	Bpbd prov jateng
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Laporan	5	5	5	300	5	300	5	320	5	300	5	350	25	1.570.000		

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan misi ke 4 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginventarisasi beberapa langkah strategis, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai;
2. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS;
3. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir;
5. Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat;
7. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana,

Kebencanaan dan lingkungan merupakan suatu siklus dan saling mempengaruhi. Kerusakan lingkungan pada satu wilayah menimbulkan bencana di wilayah tersebut maupun wilayah sekitarnya, sebaliknya terjadinya bencana disatu wilayah akan berdampak kerusakan lingkungan di wilayah tersebut maupun wilayah sekitarnya, Oleh sebab itu, untuk melaksanakan strategi pembangunan bidang penanggulangan bencana dan lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah dan kebijakan makro meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;
4. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH);

5. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
6. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi),
Kebijakan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan sasaran dan tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, Gubernur Jawa Tengah telah menetapkan arah kebijakan selama lima tahun sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Prov Jawa Tengah, Untuk mewujudkan misi ke-7, selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, arah dan kebijakan yang menjadi pedoman BPBD Prov Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana, yaitu:

- Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam penjabaran rencana pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah selama ini belum mengarah pada satu visinya yaitu “Lestari”. Maka kebijakan pembangunan daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam lima tahun kedepan harus dikedepankan, selain juga dalam upaya mitigasi menanggulangi bencana.
- Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditujukan dalam rangka menuju perwujudan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang Jawa Tengah lestari dan berkelanjutan, serta adaptif bencana, dengan indicator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. Sasarannya meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas air dan udara, serta pemenuhan ketersediaan air, dengan ukuran
 - b. keberhasilannya adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pemenuhan
 - c. kebutuhan air baku (persen);
 - d. Meningkatnya luas tutupan lahan, dengan indikator indeks tutupan hutan;
 - e. Membaiknya kualitas lingkungan pesisir dan pantai, dengan indikator berupa rasio kawasan
 - f. lindung perairan dan rasio kawasan mangrove (dalam persen);

- g. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, dengan indikator indeks
- h. kapasitas penanggulangan bencana;
- i. Menurunnya kerentanan bencana, dengan indikator indeks kerentanan bencana.

Arah kebijakan dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana lima tahun kedepan adalah:

- a. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terpadu hulu-hilir (eco-region based),
- b. lintas wilayah menuju pada efisiensi sumberdaya alam (resource efficiency);
- c. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana.

Untuk itu maka strategi pengelolaan SDA-LH dan penanggulangan bencana yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui:
 - 1) Peningkatan upaya konservasi di daerah hulu dan tangkapan air;
 - 2) Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - 3) Peningkatan kualitas tata kelola kehutanan melalui pengembangan kelembagaan KTH dan perkuatan LMDH;
 - 4) Penerapan perhutanan sosial;
 - 5) Konservasi sumber daya air;
 - 6) Pengendalian pemanfaatan air (air permukaan dan air tanah);
 - 7) Rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang;
 - 8) Meningkatkan koordinasi pengelolaan kawasan hutan, laut dan pesisir;
 - 9) Meningkatkan pengendalian sumber pencemaran air, tanah, dan udara;
 - 10) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - 11) Meningkatkan pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat;
 - 12) Meningkatkan pengendalian perijinan dan pengawasan usaha pertambangan;
 - 13) Meningkatkan ruang terbuka hijau;
 - 14) Afiriasi kebijakan rekayasa keberlanjutan pada sektor ekonomi dan secara spasial.

- b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui upaya:
- 1) Memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana;
 - 2) Mengembangkan sistem informasi penanggulangan bencana;
 - 3) Meningkatkan penanganan tematik rawan bencana;
 - 4) Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - 5) Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat;
 - 6) Mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Beserta Indikator Kinerja Pengelolaan Sumberdaya Alam – Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi
Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang Jawa Tengah lestari dan berkelanjutan, serta adaptif bencana	Indeks Risiko Bencana/Indeks Ketahanan Daerah	1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapiris iko bencana; 2. Menurunnya Kerentanan bencana alam	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui upaya: a. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana; b. Mengembangkan sistem informasi penanggulangan bencana; c. Meningkatkan penanganan tematik rawan bencana; d. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; e. Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat; f. Mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana

A. Indikator Kinerja Daerah Bidang Penanggulangan Bencana

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan, Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai,

Bidang penanggulangan bencana melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, Sasaran tersebut dicapai 2 (dua) indikator capaian utama; yaitu jumlah BPBD Kabupaten/Kota yang dibetuk berdasarkan peraturan daerah dan jumlah desa tangguh bencana, Sasaran strategis dan indikator sasaran yang akan dicapai tesebut disajikan pada Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berikut ini,

Tabel 1
Penetapan Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Jawa Tengah

N O	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Indeks Ketahanan Daerah dalam PB	3.50	3.50	3.52	3.54	3.56	3.58	3.6	3.6
	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah rawan Bencana	0	0	8	9	10	11	12	50
	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	0	0	4	5	6	7	8	30
	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2
Indikator Kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	50	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	Jenis	8	9	10	10	10	10	10	50	Sekretariat
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	1	4	2	2	2	2	2	10	Sekretariat
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Unit	60	60	60	60	60	60	60	300	Sekretariat
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	25	25	25	25	25	25	25	125	Sekretariat
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	10	Sekretariat
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Sekertariat DPRD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60	Sekretariat
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	0	0	5	5	5	5	5	25	Sekretariat
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	5	5	5	5	5	5	25	Sekretariat
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan risiko bencana	%	0	0	2	2	2	2	2	8	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Penanganan Darurat
	Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Persentase pemenuhan logistik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Logistik dan

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	bencana										Peralatan
Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	Desa	8	68	16	17	18	19	20	100	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	persentase upaya PRB Jateng	%	0	0	10	15	20	25	30	30	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	Unit	95	158	225	230	230	230	240	960	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	Orang	500	500	1000	1050	1100	1150	1200	5500	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda	Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	Angkatan	3	3	7	7	7	8	8	37	Bidang Penanganan Darurat
Pengembangan Pusdalops Jateng	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	%	0	0	10	20	30	40	40	100	Bidang Penanganan Darurat
Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	Kegiatan	0	0	2	3	4	5	5	24	Bidang Penanganan Darurat
Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	Kelompok	0	0	3	5	5	6	7	26	Bidang Penanganan Darurat
Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng	persentase masyarakat terdampak yang direhab	%	0	0	20	30	20	30	40	90	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	Orang	50	60	100	100	100	100	100	500	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng	persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	%	0	0	10	20	20	30	40	90	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	Jenis	10	10	10	10	10	10	10	50	Bidang Logistik dan Peralatan

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	persentase dapur umum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Logistik dan Peralatan
Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng	Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	Unit	10	10	10	10	10	10	10	50	Bidang Logistik dan Peralatan
	persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Logistik dan Peralatan

BAB VIII.

PENUTUP

Dokumen rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 2018-2023 disusun sesuai dengan mekanisme dan mempertimbangkan para pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah. Dokumen tersebut dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun dan/atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu. Kondisi strategis tertentu terkait dengan terjadinya bencana dalam skala yang cukup besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Jawa Tengah 2018-2023, terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Sebagai dokumen resmi, Renstra BPBD Provinsi Jawa tengah merupakan acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana dapat terwujud.

Salam tangguh dan salam Kemanusiaan.